

**PENGARUH MODAL FISIK, MODAL MANUSIA, DAN TINGKAT
PARTISIPASI ANGKATAN KERJA TERHADAP PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO (PDRB) DI PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**CITRA PUTRI NATALIA
NPM 1811021007**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENGARUH MODAL FISIK, MODAL MANUSIA, DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

CITRA PUTRI NATALIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal fisik, modal manusia, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Lampung. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data panel untuk 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada tahun 2017–2022. Variabel terikat dalam penelitian ini, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemudian variabel bebas yang digunakan antara lain, modal fisik dengan proksi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), modal manusia dengan proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara modal fisik dan modal manusia terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Lampung. Sedangkan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Lampung.

Kata kunci: Modal Fisik, Modal Manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Produk Domestik Regional Bruto

ABSTRACT

THE EFFECT OF PHYSICAL CAPITAL, HUMAN CAPITAL, AND LABOR FORCE PARTICIPATION RATE ON THE GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT (GRDP) IN LAMPUNG PROVINCE

By

CITRA PUTRI NATALIA

This research aims to analyze the effect of physical capital, human capital, and labor force participation rate on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) in Lampung Province. The analytical method used in this research is panel data analysis method for 15 regencies/cities in Lampung Province from 2017 to 2022. The dependent variable in this research is the Gross Regional Domestic Product (GRDP). The independent variables were physical capital proxied by Gross Fixed Capital Formation (GFCF), human capital proxied by the Human Development Index (HDI), and the Labor Force Participation Rate (LFPR). The results showed that there was a positive and significant effect between physical capital and human capital on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) in Lampung Province. Meanwhile, the Labor Force Participation Rate (LFPR) had a insignificant effect on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) in Lampung Province.

Keywords: *Physical Capital, Human Capital, Labor Force Participation Rate, Gross Regional Domestic Product*

**PENGARUH MODAL FISIK, MODAL MANUSIA, DAN TINGKAT
PARTISIPASI ANGKATAN KERJA TERHADAP PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO (PDRB) DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

CITRA PUTRI NATALIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PENGARUH MODAL FISIK, MODAL MANUSIA,
DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN
KERJA TERHADAP PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO (PDRB) DI PROVINSI
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Citra Putri Natalia**

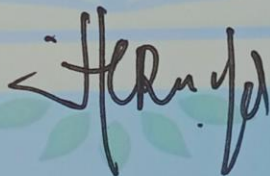
Nomor Pokok Mahasiswa : **1811021007**

Jurusan : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

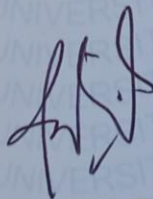
Komisi Pembimbing



Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.
NIP 197702122006041001

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan,



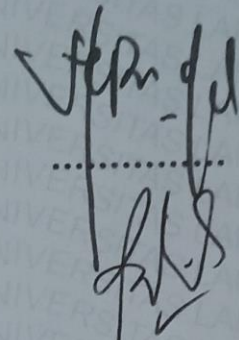
Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M.
NIP 198007052006042002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

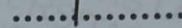
Ketua

: **Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.**



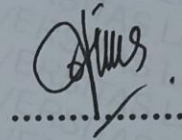
Penguji I

: **Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M.**



Penguji II

: **Zulfa Emalia, S.E., M.Sc.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si

NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **9 Agustus 2024**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, 9 Agustus 2024

Penulis



CITRA PUTRI NATALIA

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Citra Putri Natalia. Penulis dilahirkan pada tanggal 25 Desember 1999 di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Daniel Swiantoro dan Ibu Suparyati.

Penulis memulai pendidikannya di Taman Kanak-kanak (TK) Citra Melati Kota Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2006. Pada tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Segala Mider Kota Bandar Lampung. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2012. Ketika SMP, penulis mengikuti ekstrakurikuler Pramuka, Rohis, dan Mading (Majalah Dinding). Tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Bandar Lampung. Penulis mengikuti berbagai ekstrakurikuler diantaranya Pramuka dan Rohis, serta organisasi luar sekolah yaitu FORKAPMI (Forum Kerja Sama Pelajar Muslim) se-Kota Bandar Lampung. Penulis kemudian menamatkan pendidikan jenjang SMA pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung di Jurusan Ekonomi Pembangunan, melalui jalur masuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Pada tahun 2019 penulis terpilih sebagai penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), kemudian menjadi bagian penerima Beasiswa Cendikia BAZNAS Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 serta turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan BAZNAS Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2020 penulis berpartisipasi sebagai enumerator survey nasional “Survey Indeks Literasi Zakat Dan Wakaf Oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS”. Kemudian, di tahun yang sama penulis juga berpartisipasi sebagai enumerator survey nasional “Survei Pendayagunaan Masjid Dan Dakwah Ekonomi Islam Indonesia Oleh KA-FoSSEI, MES, dan FoSSEI”.

Pada tahun 2021 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Kegiatan organisasi mahasiswa yang pernah diikuti penulis antara lain Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA), Rohani Islam (ROIS) FEB Unila, dan Bina Rohani Islam Mahasiswa (Birohmah) Unila, serta organisasi luar kampus yaitu Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Ekonomi Indonesia (FULDFEI) Regional Sumbagsel, Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Regional Sumbagsel, dan Forum Kerja Sama Alumni Rohis (FKAR) Kota Bandar Lampung.

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillah rabbi 'aalamiin segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, serta berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Penulis persembahkan karya sederhana ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kepada:

Ibu dan Ayah tercinta, terima kasih untuk Ayah Daniel Swiantoro dan Ibu Suparyati yang telah memberikan dukungan, doa, serta kasih sayang sehingga menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan jenjang perkuliahan ini. Terima kasih juga untuk segala pengorbanan, perjuangan, dan pelajaran hidup yang luar biasa.

Kedua adikku tersayang, terima kasih untuk Tiara Aprilia dan Muhammad Fajar Akbari yang telah memberikan dukungan dan doa, serta selalu menghiburku setiap saat. Semoga kalian bisa menjadi orang yang bermanfaat dan sukses selalu.

Seluruh keluarga besar, sahabat, dan teman-teman yang senantiasa memberikan doa dan dukungan, serta telah membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan. Sebuah perjuangan panjang dan penuh cerita yang tak lepas dari doa tulus kalian semua.

Seluruh dosen, staf, dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan yang senantiasa membantu, memberikan ilmu, motivasi, arahan, dan pelajaran yang luar biasa dalam proses perkuliahan dan penyelesaian karya tulis ini, serta Almamater tercinta Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil 'aalamiin segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, serta berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat skripsi yang berjudul “Pengaruh Modal Fisik, Modal Manusia, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Lampung” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu, saran, arahan, dan motivasi agar skripsi ini dapat selesai dengan hasil yang baik.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan arahan, saran, dan tambahan ilmu dengan penuh ketelitian sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
3. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus Dosen Penguji yang telah memberikan arahan, saran, dan tambahan ilmu dengan penuh ketelitian sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan arahan, perhatian, motivasi, dukungan, ilmu, dan saran kepada penulis hingga skripsi terselesaikan.

5. Ibu Dr. Tiara Nirmala, S.E., M.Sc. selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan arahan, saran, dan tambahan ilmu dengan penuh ketelitian sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Bapak Arif Darmawan, S.E., M.Sc selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan arahan, saran, dan tambahan ilmu dengan penuh ketelitian sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Ibu Resha Moniyana, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan arahan, saran, dan tambahan ilmu dengan penuh ketelitian sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik
8. Bapak Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat, bimbingan, dan arahan untuk perkembangan studi penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, serta seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat bermanfaat selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
10. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas seluruh bantuan yang selama ini diberikan kepada penulis.
11. Ayah dan Ibu tercinta, Daniel Swiantoro dan Suparyati yang senantiasa memberikan doa, nasihat, dan dukungan kepada penulis, terima kasih atas segala pengorbanan, perjuangan, dan kasih sayang yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kedua adikku Tiara Aprilia dan Muhammad Fajar Akbari yang selalu memberikan dukungan dan terus mengukir senyum untuk setiap langkahku.
13. Seluruh keluarga besar, sahabat, dan teman-teman yang senantiasa memberikan doa dan dukungan, serta telah membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan.
14. Keluarga Besar Rois FEB Unila, BSO KSEI FoSEIL Unila, Birohmah Unila, FoSSEI Regional Sumbagsel, dan FKAR Kota Bandar Lampung, serta seluruh aktivis dakwah sekolah dan aktivis dakwah kampus. Terima kasih sudah kebersamai dalam berorganisasi, serta pengalaman dan kebersamaan yang luar biasa.

15. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Pembangunan 2018, terima kasih telah berjuang bersama, kekompakan, dan kekeluargaannya.
16. Keluarga Besar jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, terima kasih untuk segala ilmu dan pengalaman yang luar biasa kepada penulis.
17. Keluarga besar kuliah kerja nyata (KKN) Kelurahan Susunan Baru, terima kasih untuk hari-hari menyenangkan, doa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
18. Keluarga besar BAZNAS dan penerima beasiswa cendikia BAZNAS Kota Bandar Lampung segala ilmu, pengalaman, dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
19. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dari awal hingga skripsi ini selesai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, saran dan kritik untuk pengembangan lebih lanjut sangatlah diharapkan penulis. Akan tetapi, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga segala bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa yang diberikan kepada penulis mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, 9 Agustus 2024

Penulis

Citra Putri Natalia

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Landasan Teori.....	19
2.1.1 Fungsi dan Peran Pemerintah	19
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	22
2.1.3 Modal Fisik	27
2.1.4 Modal Manusia.....	29
2.1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	34
2.2 Tinjauan Empiris	35
2.3 Kerangka Pemikiran	40
2.4 Hipotesis	42
III. METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	43
3.3 Data dan Sumber Data.....	43
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	44
3.4.1 Modal Fisik	44
3.4.2 Modal Manusia.....	44
3.4.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	45
3.4.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	45
3.5 Metode Analisis Data	46
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	46

3.5.2 Analisis Regresi Data Panel	46
3.5.3 Uji Spesifikasi Model	49
3.5.3.1 Uji Chow.....	49
3.5.3.2 Uji Hausman	49
3.5.3.3 Uji Breusch Pagan – Lagrange Multiplier Test	50
3.5.4 Uji Asumsi Klasik.....	50
3.5.4.1 Uji Normalitas.....	50
3.5.4.2 Uji Heteroskedastisitas	51
3.5.4.3 Uji Autokorelasi.....	51
3.5.4.4 Deteksi Multikolinieritas	52
3.5.5 Uji Hipotesis.....	52
3.5.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	52
3.5.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	54
3.5.5.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	54
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Analisis Statistik Deskriptif	55
4.2 Hasil Pengujian	56
4.2.1 Uji Spesifikasi Model	56
4.2.1.1 Uji Chow.....	56
4.2.1.2 Uji Hausman	57
4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik	58
4.2.2.1 Uji Normalitas.....	58
4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas	58
4.2.2.3 Uji Autokorelasi.....	59
4.2.2.4 Deteksi Multikolinieritas	60
4.2.3 Hasil Estimasi Regresi Model Data Panel	61
4.2.4 Pengujian Hipotesis	61
4.2.4.1 Uji t- <i>Statistik</i>	62
4.2.4.2 Uji F- <i>Statistik</i>	63
4.2.4.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	64
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	64
4.3.1 Pengaruh Modal Fisik Terhadap PDRB di Kota/Kabupaten Provinsi Lampung Tahun 2017-2022.....	65
4.3.2 Pengaruh Modal Manusia Terhadap PDRB di Kota/Kabupaten Provinsi Lampung Tahun 2017-2022.....	67
4.3.3 Pengaruh TPAK Terhadap PDRB di Kota/Kabupaten Provinsi	

Lampung Tahun 2017-2022.....	69
4.4 Analisis Intersep Model Regresi <i>Fixed Effect (Individual Effect)</i>	72
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	85
5.1 Simpulan	85
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017–2022	3
1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017–2022	8
2.1 Nilai Minimum dan Maksimum Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	32
2.2 Tinjauan Empiris	35
3.1 Ringkasan Variabel Penelitian	44
3.2 Ketentuan Uji Autokorelasi	52
4.1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	55
4.2 Hasil Uji Chow	56
4.3 Hasil Uji Hausman	57
4.4 Uji Heteroskedastisitas	59
4.5 Hasil Deteksi Multikolinieritas	61
4.6 Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i>	61
4.7 Hasil Uji t-Statistik	62
4.8 Hasil Uji F-Statistik	63
4.9 Nilai Intersep PDRB Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Lampung Tahun 2017–2022	2
1.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Lampung Tahun 2017–2022	5
1.3 Rata-Rata Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017–2022	6
1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Lampung Tahun 2017–2022 ..	12
1.5 Rata-Rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Lampung Tahun 2017–2022	15
2.1 Kerangka Pemikiran	40
4.1 Uji Normalitas	58
4.2 Uji Autokorelasi	60

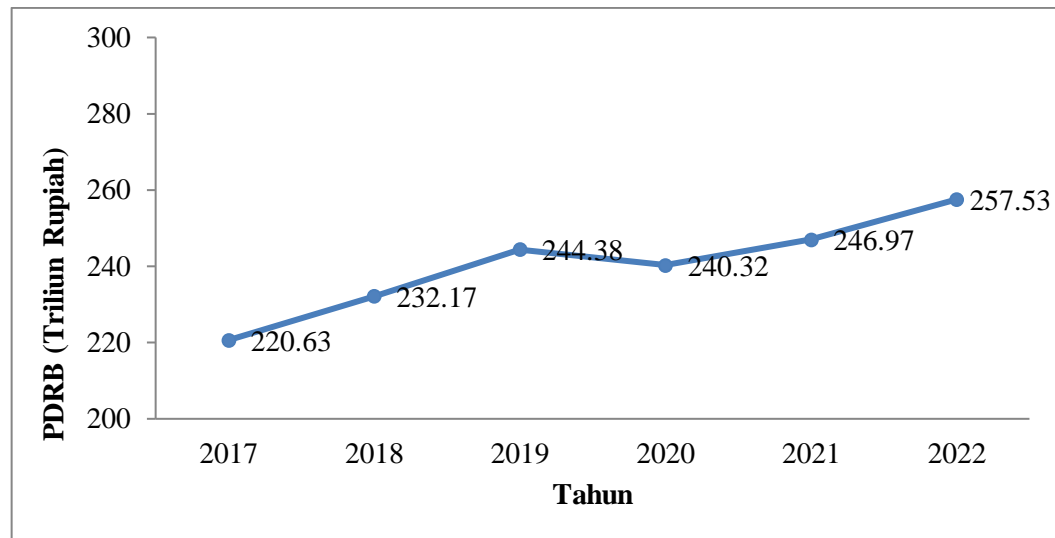
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi dinilai menjadi parameter penting dalam menganalisis hasil kerja perekonomian suatu negara (Wahyudi dkk., 2023). Apabila terjadi kenaikan produksi barang/jasa dibandingkan tahun sebelumnya, maka perekonomian suatu negara atau daerah dinilai mengalami pertumbuhan (Umiyati dalam Haerani dan Rahman, 2021). Selain itu, pertumbuhan ekonomi didefinisikan oleh Case and Fair (2007) sebagai peningkatan output perekonomian secara keseluruhan. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemajuan atau perkembangan positif dalam perekonomian (Amir dalam Jojo dkk., 2019).

Prinsip dasar ekonomi makro menuturkan bahwa pengukuran pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bagi tataran daerah serta Produk Domestik Bruto (PDB) bagi tataran nasional (Hanifah dan Yulhendri, 2022). Wahyudi dkk. (2023) menyatakan bahwa PDB digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pada permasalahan tingkat makro, serta berfungsi untuk menentukan tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu negara. Mankiw et al. (2014) menambahkan PDB adalah ukuran kinerja terbaik untuk menilai perekonomian dikarenakan kemampuannya dalam mengestimasi output barang/jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian secara keseluruhan.

Sebagai sebuah provinsi yang berada di Pulau Sumatera, Provinsi Lampung tercatat memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif meski berfluktuasi dalam kurun waktu 2017–2022. Selama rentang waktu tersebut, perekonomian Provinsi Lampung menunjukkan pertumbuhan positif yang cenderung menguat, hal ini tercermin dari nilai PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010, seperti yang tergambar dalam grafik berikut ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Lampung Tahun 2017–2022 (dalam Triliun Rupiah).

Berdasarkan grafik 1.1 selama tahun 2017–2019 Provinsi Lampung terus mengalami kenaikan capaian PDRB ADHK hingga 244,38 triliun rupiah pada tahun 2019 dengan pertumbuhan 5,25 persen. Akan tetapi, Provinsi Lampung sempat mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi sebagai imbas dari pandemi *covid-19* yang memengaruhi kinerja ekonomi domestik. Penurunan tersebut terjadi pada tahun 2020, di mana capaian PDRB Provinsi Lampung hanya mampu menembus angka 240,32 triliun rupiah dan tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, strategi pemulihan ekonomi terus dilakukan dan secara perlahan mulai merangkak naik pada tahun 2021 dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,77 persen atau mencapai 246,97 triliun rupiah. Provinsi Lampung mampu mempertahankan pertumbuhan positif pada tahun 2022, yaitu sebesar 4,28 persen atau menyentuh angka 257,53 triliun rupiah (BPS Provinsi Lampung, 2022).

Berdasarkan data tersebut, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung terhitung sebesar 3,51 persen rata-rata per tahun selama periode 2017–2022. Dengan hasil tersebut, secara nasional Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-24 dan masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional (3,7%). Keadaan ini mengindikasikan bahwa jika dibandingkan dengan provinsi lain, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2017–2022 dinilai

masih relatif rendah (BPS Provinsi Lampung, 2022). Provinsi Lampung secara administratif terdiri dari 2 kota dan 13 kabupaten, banyaknya kota/kabupaten ini dapat menunjukkan potret wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang beragam, seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017–2022 (dalam Triliun Rupiah)

Kabupaten/Kota	PDRB ADHK						Rata-rata
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Lampung Barat	4.51	4.74	4.98	4.93	5.05	5.26	4.91
Tanggamus	9.86	10.35	10.87	10.68	10.93	11.38	10.68
Lampung Selatan	27.36	28.79	30.27	29.74	30.54	32.04	29.79
Lampung Timur	27.5	28.52	29.6	28.93	29	29.59	28.86
Lampung Tengah	43.11	45.41	47.84	47.35	48.71	50.97	47.23
Lampung Utara	14.88	15.67	16.51	16.27	16.73	17.26	16.22
Way Kanan	8.65	9.1	9.57	9.46	9.74	10.17	9.45
Tulang Bawang	14.24	15.01	15.83	15.61	16.06	16.69	15.58
Pesawaran	10.34	10.86	11.4	11.26	11.49	12.02	11.23
Pringsewu	7.02	7.37	7.74	7.65	7.87	8.21	7.64
Mesuji	6.32	6.66	7.01	6.91	7.11	7.36	6.89
Tulang Bawang Barat	7.08	7.45	7.85	7.75	7.97	8.33	7.74
Pesisir Barat	2.8	2.94	3.11	3.07	3.13	3.22	3.05
Bandar Lampung	34.92	37.08	39.37	38.63	39.83	41.8	38.61
Metro	3.87	4.08	4.31	4.23	4.36	4.55	4.24

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

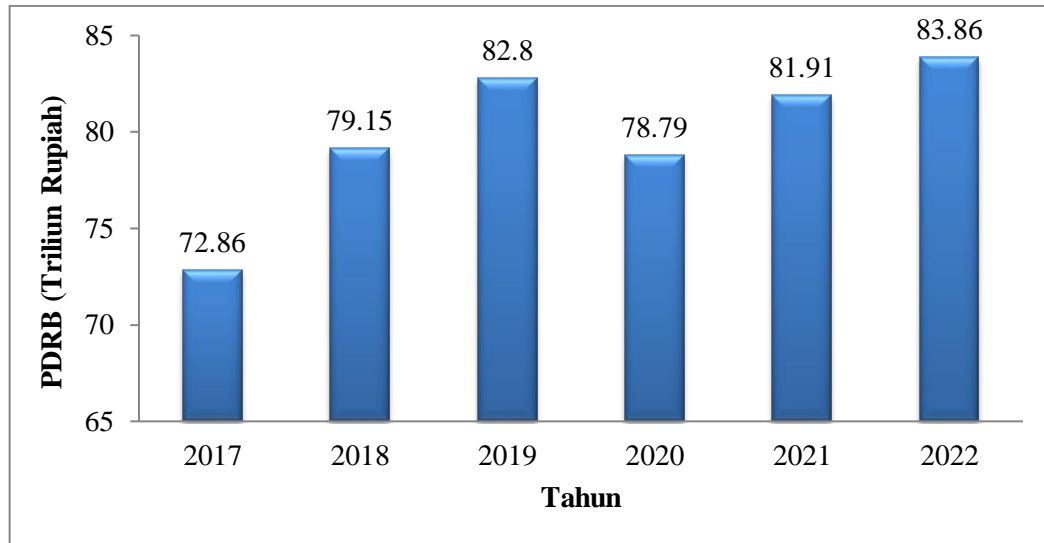
Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa Kabupaten Pesisir Barat dengan rata-rata nilai PDRB ADHK sebesar 3,05 triliun rupiah merupakan daerah dengan capaian terendah, sedangkan rata-rata nilai PDRB ADHK tertinggi terdapat pada Kabupaten Lampung Tengah sebesar 47,23 triliun rupiah atau selisih 44,18 triliun rupiah. Kesenjangan capaian PDRB ADHK tertinggi dan terendah di daerah tersebut menunjukkan bahwa perekonomian di Provinsi Lampung belum mengalami pertumbuhan secara merata (BPS Provinsi Lampung, 2022). Selain itu, perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dinilai belum optimal mengingat potensi sumber daya yang dimiliki serta potensi geografis sebagai gerbang utama Pulau Sumatera yang mampu mendorong perkembangan ekonomi daerah Provinsi Lampung (DJPb Provinsi Lampung, 2023).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang belum optimal dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam variabel-variabel makro ekonomi. Menurut Wasiaturrehman dan Chairunissa (2022), pembangunan manusia, modal fisik, dan angkatan kerja adalah input yang berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi. Model *Augmented Solow* menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari 3 (tiga) faktor, antara lain modal manusia, pertumbuhan *capital* (modal fisik), dan tenaga kerja (Mankiw dalam Supartoyo dkk., 2013).

Para ahli teori neoklasik menilai bahwa modal fisik (*physical capital*) merupakan salah satu elemen kunci dalam proses perkembangan dan pertumbuhan ekonomi (Amir et al., 2015). Investasi modal fisik akan menstimulasi pembentukan modal, peningkatan jumlah gedung, bangunan, serta peralatan lainnya, yang pada gilirannya akan mendorong potensi output daerah, serta memicu pertumbuhan ekonomi (Royan dalam Alayda dkk., 2022). Dengan adanya investasi fisik yang meningkat akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui kenaikan kapasitas produksi, hal ini dapat menghasilkan nilai tambah dan output lebih besar (Arsyad dalam Sufriyandi et al., 2022).

Modal fisik diartikan sebagai seluruh biaya atau pengeluaran yang dapat meningkatkan pasokan modal atau menciptakan modal baru (Mankiw dalam Sjafii, 2010). Kinerja investasi modal fisik dapat dilihat melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang menggambarkan kontribusi komponen ini terhadap kinerja ekonomi regional (Bank Indonesia, 2023).

Untuk wilayah Provinsi Lampung, data menunjukkan bahwa peningkatan kinerja investasi fisik adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Hal tersebut tercermin pada kontribusi PMTB sebesar 33,3 persen selama tahun 2017–2022 dan menempatkan PMTB sebagai kontributor kedua terbesar dengan kontribusi sebesar 60,3 persen. Kontribusi kinerja investasi tersebut didorong oleh pemugaran investasi swasta dan kenaikan alokasi anggaran untuk belanja modal. Di sisi lain, PMTB Provinsi Lampung selama tahun 2017–2022 cukup fluktuatif, seperti yang tergambar dalam grafik berikut ini:

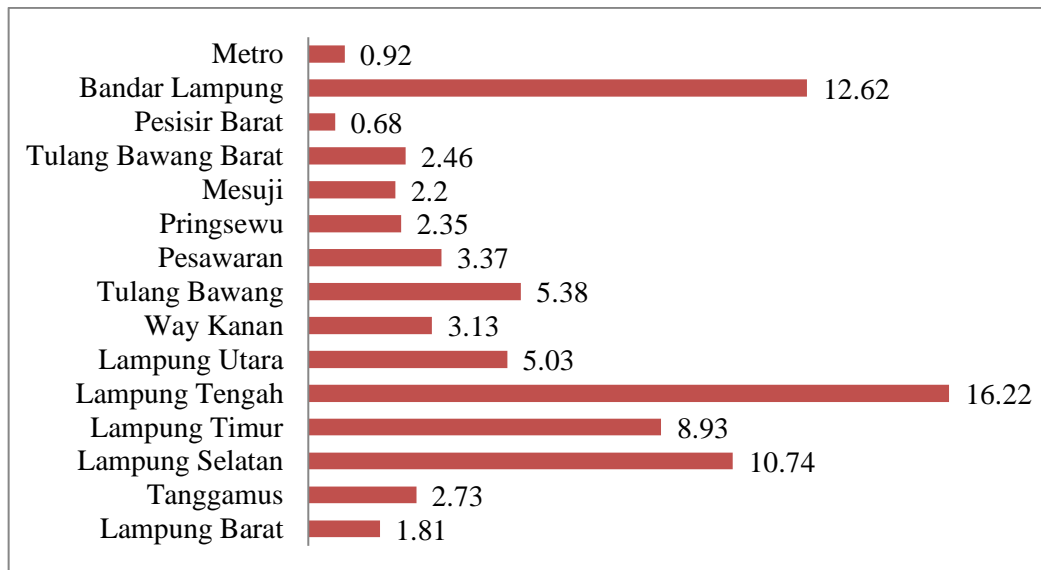


Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Gambar 1.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Lampung Tahun 2017–2022 (dalam Triliun Rupiah).

Berdasarkan gambar 1.2, PMTB Provinsi Lampung selama tahun 2017–2019 terus mengalami pertumbuhan positif, hingga pada tahun 2019 tumbuh sebesar 0,066 persen atau menyentuh angka 82,8 triliun rupiah (BPS Provinsi Lampung, 2022). PMTB semakin meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional di Provinsi Lampung (DJPb Provinsi Lampung, 2019).

Namun, capaian PMTB mencatatkan penurunan sebesar 0,047 persen pada tahun 2020 karena terhambatnya aliran modal dan proyek investasi fisik sebagai dampak dari pandemi *covid-19*. Akan tetapi, tren positif kembali terlihat pada tahun-tahun berikutnya, hingga pada tahun 2022 mampu menyentuh angka 83,86 triliun rupiah akibat dukungan output sektor konstruksi. Dengan demikian, capaian PMTB Provinsi Lampung tercatat meningkat rata-rata 0,032 persen per tahun selama periode 2017–2022 (BPS Provinsi Lampung, 2022). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembentukan modal berperan penting dalam melaksanakan pembangunan ekonomi suatu negara (Rostiana dan Rodesbi, 2020). Di samping itu, seluruh kota/kabupaten di Provinsi Lampung menunjukkan rata-rata capaian PMTB yang beragam, seperti yang tergambar dalam grafik berikut ini:



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Gambar 1.3 Rata-Rata Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017–2022 (dalam Triliun Rupiah).

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa rata-rata nilai PMTB terendah di Provinsi Lampung terdapat pada Kabupaten Pesisir Barat sebesar 0,68 triliun rupiah, sedangkan rata-rata nilai PMTB tertinggi terdapat pada Kabupaten Lampung Tengah sebesar 16,22 triliun rupiah atau selisih 15,54 triliun rupiah. Kesenjangan yang cukup signifikan antara daerah dengan nilai PMTB tertinggi dan terendah menunjukkan bahwa capaian PMTB di Provinsi Lampung masih belum merata (BPS Provinsi Lampung, 2022). Sulistiawati (2012) menyatakan bahwa tidak meratanya persebaran investasi akan menyebabkan kesenjangan pembangunan.

Selain itu, menurut Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampung (2023), belum optimalnya capaian investasi di Provinsi Lampung disebabkan lemahnya sistem pelayanan perizinan. Kondisi ini terjadi karena kurangnya kemampuan staf serta sarana prasarana yang mendukung pelayanan, di mana proses pelayanan perizinan memerlukan akses internet berkecepatan tinggi seringkali terkendala. Masalah lainnya adalah belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah untuk meningkatkan realisasi investasi modal fisik di Provinsi Lampung. Menurut Ardyan dan Mulyo dalam Mulyasari (2016), pengembangan perekonomian dapat disesuaikan dengan potensi dan kekhasan daerah didukung dengan peran

pemerintah daerah yang diharapkan dapat memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi daerah tersebut.

Pengaruh positif modal fisik terhadap pertumbuhan ekonomi ditemukan oleh Pratiwi (2021) yang mengidentifikasi bahwa peningkatan investasi modal fisik memengaruhi tingkat PDRB. Investasi memengaruhi PDRB melalui peningkatan *capital stock*, di mana pembangunan ekonomi akan meningkat jika investasinya kuat dan terus meningkat. Hasil serupa didapatkan dari penelitian Wasiaturrahma dan Chairunissa (2022) yang memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh variabel PMTB. Dampak positif ini dijelaskan melalui peran pembentukan modal yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kemampuan produksi barang/jasa.

Namun, beberapa penelitian memiliki perbedaan hasil, seperti Haidar dan Firmansyah (2021) menemukan bahwa aliran modal dengan proksi PMTB tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN+6 secara signifikan. Sejalan dengan kajian tersebut, Lestari dkk. (2022) melalui hasil estimasinya menemukan bahwa pengaruh PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah tidak signifikan.

Selain kontribusi modal fisik, dalam suatu negara modal manusia juga memainkan peran penting bagi pertumbuhan ekonomi (Todaro and Smith, 2011). Studi Sirait (2016) mengungkapkan bahwa kesiapan dan kualitas modal manusia sangat memengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Negara dengan modal manusia yang berkualitas dinilai mampu berkembang dengan kemampuan yang lebih baik. Peran penting modal manusia juga terlihat dari kemampuannya dalam memaksimalkan faktor produksi, karena penduduk yang berkualitas mampu berinovasi dan mengembangkan faktor produksi yang dimiliki (Afriliani dkk., 2023). Investasi modal fisik dapat meningkatkan produktivitas perekonomian jika dikelola oleh penduduk dengan kualitas yang memadai. Maka, modal manusia yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan diperlukan untuk mencapai pemanfaatan modal fisik se-produktif mungkin (Jhingan dalam Rani dkk., 2021).

Dalam mengukur pencapaian modal manusia (*human capital*), *United Nations Development Program (UNDP)* mempublikasikan pendekatan yang mengukur modal manusia dengan kerangka pikir *human development* yang dinyatakan dalam IPM yang secara teknis didasarkan pada 3 (tiga) aspek dasar pengukuran, antara lain kesehatan, pendidikan, dan *standar of living*. Penggunaan parameter tersebut dinilai dapat mengukur modal manusia secara lebih akurat dan memiliki kemungkinan hubungan yang lebih kuat dengan modal manusia (Budiarti, 2019). Peningkatan ketiga faktor tersebut diharapkan dapat mendorong keberhasilan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah. Indeks pembangunan manusia yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat modal manusia semakin baik (Yusuf dkk., 2022).

Selama tahun 2017–2022, perkembangan modal manusia kota/kabupaten di Provinsi Lampung cukup progresif. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian IPM yang tumbuh positif setiap tahunnya, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017–2022 (dalam persen)

Kabupaten/Kota	IPM						Rata-rata
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Lampung Barat	66.06	66.74	67.5	67.8	67.9	68.39	67.40
Tanggamus	64.94	65.67	66.37	66.42	66.65	67.22	66.21
Lampung Selatan	66.95	67.68	68.22	68.36	68.49	69	68.12
Lampung Timur	68.05	69.04	69.34	69.37	69.66	70.58	69.34
Lampung Tengah	68.95	69.73	70.04	70.16	70.23	70.8	69.99
Lampung Utara	66.58	67.17	67.63	67.67	67.89	68.33	67.55
Way Kanan	65.97	66.63	67.19	67.44	67.57	68.04	67.14
Tulang Bawang	67.07	67.7	68.23	68.52	68.73	69.53	68.30
Pesawaran	64.43	64.97	65.75	65.79	66.14	66.7	65.63
Pringsewu	68.61	69.42	69.97	70.3	70.45	70.98	69.96
Mesuji	61.87	62.88	63.52	63.63	64.04	64.94	63.48
Tulang Bawang Barat	64.58	65.3	65.93	65.97	66.22	67.13	65.86
Pesisir Barat	62.2	62.96	63.79	63.91	64.3	65.14	63.72
Bandar Lampung	75.98	76.63	77.33	77.44	77.58	78.01	77.16
Metro	75.87	76.22	76.77	77.19	77.49	77.89	76.91
Provinsi Lampung	68.25	69.02	69.57	69.69	69.9	70.45	69.48

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Berdasarkan tabel 1.2 selama tahun 2017–2022 Provinsi Lampung terus mengalami kenaikan tingkat modal manusia. Provinsi Lampung mencapai IPM sebesar 68,25 pada tahun 2017 dengan pertumbuhan 0,0091 persen. Selanjutnya, IPM Provinsi Lampung terus tumbuh positif pada tahun-tahun berikutnya mencapai 70,45 pada tahun 2022 dan menunjukkan tingkat modal manusia yang semakin baik. Berdasarkan data tersebut, capaian IPM pada tahun 2022 adalah yang terbesar mencapai 68,45 dan capaian IPM terendah pada tahun 2017 hanya mampu menyentuh angka 68,25 (BPS Provinsi Lampung, 2022).

Data tersebut juga mencatat bahwa selama tahun 2017–2022, IPM seluruh kota/kabupaten di Provinsi Lampung terus tumbuh positif dengan rata-rata IPM sebesar 68,45. Dengan capaian ini, status IPM Provinsi Lampung berada pada kategori sedang. Namun, capaian IPM Provinsi Lampung tersebut masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional (71,88) dan belum mampu beranjak dari peringkat terbawah se-Sumatera selama tahun 2017–2022. Meski demikian, capaian IPM Lampung konsisten mengalami peningkatan tiap tahunnya (BPS Provinsi Lampung, 2022).

Tabel 1.2 juga memperlihatkan bahwa capaian IPM Provinsi Lampung memiliki variasi hasil antar kabupaten/kota. Kota Metro dan Bandar Lampung telah mencatatkan daerahnya sebagai wilayah berstatus IPM “tinggi”, bahkan mengungguli rata-rata nasional. Namun sayangnya, IPM tingkat kabupaten masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional dan seluruhnya masih tergolong ke dalam wilayah dengan tingkat IPM berstatus “sedang”. Provinsi dengan tingkat modal manusia tertinggi adalah Kota Bandar Lampung dengan rata-rata IPM mencapai 77,16, kemudian diikuti oleh Metro, Lampung Tengah, Pringsewu, Lampung Timur, Tulang Bawang, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Pesawaran, dan Pesisir Barat. Kondisi berbeda dialami oleh Kabupaten Mesuji yang menempati posisi terbawah se-Provinsi Lampung dengan IPM rata-rata yaitu 63,48 atau selisih 13,68 angka dengan Kota Bandar Lampung (BPS Provinsi Lampung, 2022).

Data tersebut menggambarkan bahwa terdapat kesenjangan tingkat modal manusia di Provinsi Lampung, sehingga diperlukan peningkatan dan pemerataan

modal manusia. Dengan tingkat modal manusia yang berkualitas dinilai dapat mengoptimalkan kemampuan masyarakat dalam menerima dan mengelola sumber daya ekonomi (Nurwijayati, 2017). Disparitas/ketimpangan dalam pencapaian pembangunan manusia dapat terjadi karena wilayah yang luas dan pembangunan yang tidak merata (Badan Pusat Statistik, 2020).

Manurung dkk. (2022) menemukan bahwa PDRB di Provinsi Banten dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh variabel IPM. Penelitian tersebut menuturkan bahwa bagi pertumbuhan ekonomi, modal manusia dengan proksi IPM menjadi determinan yang penting. Hasil ini sependapat dengan studi Wasiaturrahma dan Chairunissa (2022), hasil penelitiannya menyatakan bahwa modal manusia dengan proksi IPM berpengaruh signifikan dan positif terhadap PDB ADHK sebagai proksi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penulis menemukan bahwa negara-negara dengan IPM tertinggi merupakan penghasil PDB tertinggi di dunia.

Namun, hasil berbeda justru ditemukan oleh Mukarramah dkk. (2019) yang menemukan bahwa di Kabupaten Aceh Timur, pengaruh IPM terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tidak signifikan. Prameswari dkk. (2021) juga memperoleh hasil berbeda bahwa IPM tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa variasi dalam hasil dapat terjadi karena setiap daerah memiliki perbedaan komposisi dari 3 (tiga) komponen IPM dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Didasarkan pada capaian IPM Provinsi Lampung yang belum memenuhi target, kebijakan terkait indikator penyusun IPM perlu dievaluasi kembali. Hal ini perlu dilakukan mengingat porsi belanja untuk bidang ini cukup besar. Lemahnya produktivitas dan efektivitas dalam pembiayaan sektor-sektor pembentuk IPM masih menjadi persoalan. Pembiayaan belum fokus pada peningkatan kualitas dan masih terbatas pada aspek kuantitas, sehingga besarnya porsi belanja ketiga bidang belum efektif mendorong peningkatan IPM. Hal ini kemudian menyebabkan kapasitas sumber daya manusia masih rendah untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung (DJPb Provinsi Lampung, 2019).

Masalah di atas juga berujung pada sulitnya akses untuk memperoleh fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, khususnya kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Tulang Bawang. Begitu juga dengan fasilitas pendidikan, masyarakat desa masih kesulitan untuk menjangkau pendidikan terutama SMP dan SMA, khususnya di Kabupaten Lampung Barat, Way Kanan, Tulang Bawang, Mesuji, dan Pesisir Barat (DJPb Provinsi Lampung, 2022).

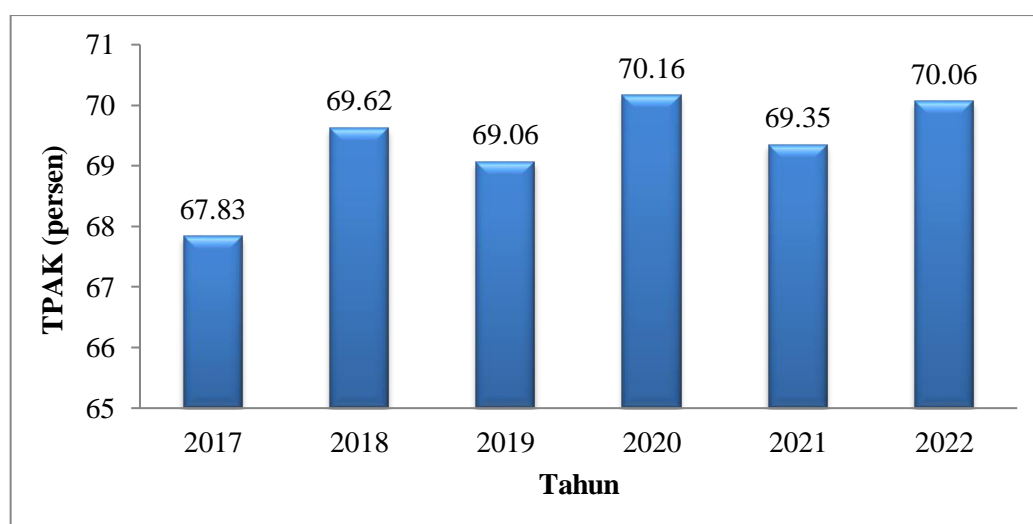
Tantangan di bidang pendidikan juga muncul dari masyarakat yang mengalami disorientasi tujuan terhadap pendidikan. Sektor pertanian merupakan lapangan kerja utama bagi penduduk perdesaan di Provinsi Lampung sehingga mereka lebih memilih untuk menggarap lahan daripada melanjutkan pendidikan. Rendahnya minat untuk melanjutkan pendidikan juga dipengaruhi oleh jarak yang jauh dan faktor biaya (DJPb Provinsi Lampung, 2021). Dengan demikian, peran pemerintah perlu dioptimalkan dalam menyusun kebijakan dan strategi khusus akselerasi peningkatan IPM Provinsi Lampung agar dapat mengejar ketertinggalan dari capaian IPM nasional. Bahkan lebih lanjut, peningkatan IPM tersebut dapat lebih besar pengaruhnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal (DJPb Provinsi Lampung, 2018).

Hal tersebut sejalan dengan *endogenous growth theory* yang menegaskan peran pemerintah dalam peningkatan modal manusia melalui optimalisasi produktivitas sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi (Fikri, 2017). Pemerintah juga memegang peran penting melalui kebijakan fiskal dalam bentuk pengeluaran pemerintah untuk mendukung peningkatan modal manusia. Pengeluaran pemerintah yang lebih produktif akan memengaruhi perekonomian menuju arah yang lebih baik (Lubis dalam Hanifah dan Yulhendri, 2022).

Selain peningkatan pada kualitas modal manusia, ketersediaan tenaga kerja juga menjadi unsur yang menyokong pertumbuhan ekonomi (Lind dalam Budiman, 2021). Prameswari dkk. (2021) menambahkan bahwa dari segi kuantitas, tenaga kerja merupakan satu di antara elemen yang berpengaruh pada tingkat pendapatan nasional. Peningkatan tenaga kerja produktif dapat berkontribusi pada peningkatan output perekonomian secara keseluruhan (Hartati, 2021). Todaro and

Smith (2011) juga mengungkapkan pemikiran serupa bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipacu melalui kontribusi pertumbuhan tenaga kerja.

TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) dinilai sebagai parameter ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan besaran relatif dari tenaga kerja yang berkontribusi memproduksi barang/jasa dalam perekonomian (BPS Provinsi Lampung, 2023). Nilai TPAK yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa lebih banyak penduduk usia kerja yang aktif berkontribusi dalam aktivitas ekonomi (DJPb Provinsi Lampung, 2023). Sementara itu, selama tahun 2017–2022 capaian TPAK Provinsi Lampung mengalami fluktuasi dan cenderung tidak stabil, seperti yang tergambar dalam grafik berikut ini:



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Gambar 1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Lampung Tahun 2017–2022 (dalam Persen).

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa selama tahun 2017–2022 terjadi ketidakstabilan dalam capaian TPAK, di mana setiap tahun Provinsi Lampung mengalami peningkatan dan penurunan TPAK secara bergantian. Pada tahun 2017, TPAK tercatat mencapai 67,83 persen atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (BPS Provinsi Lampung, 2022). Menurut Bank Indonesia (2018), hal ini dipicu oleh pergeseran aktivitas penduduk angkatan kerja, yang kini lebih berfokus pada pendidikan dan pengelolaan rumah tangga.

Kemudian, capaian TPAK kembali menunjukkan tren positif pada tahun 2018, yaitu meningkat menjadi 69,62 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk bekerja sebanyak 164,2 ribu orang (Bank Indonesia, 2019). Pada tahun berikutnya, TPAK kembali menurun menjadi 69,06 persen, hal ini sejalan dengan menurunnya produktivitas tenaga kerja akibat turunnya jumlah *full time worker* (Bank Indonesia, 2020).

Kemudian, kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada tahun 2020 kembali membaik, hal ini tercermin dari capaian TPAK yang meningkat menjadi 70,16 persen. Kenaikan jumlah penduduk bekerja sebanyak 93,9 ribu dinilai menjadi faktor penyebab meningkatnya capaian TPAK tersebut. Kondisi ini juga memperlihatkan peningkatan suplai lapangan kerja meski pada tahun tersebut terjadi perlambatan dalam perekonomian. Dampak ketenagakerjaan akibat pandemi *covid-19* tercatat belum begitu dirasakan pada awal kemunculannya di tahun 2020. Namun, sejak triwulan IV 2020 perlahan mulai memengaruhi kondisi ketenagakerjaan dengan jumlah 655,9 ribu orang terkena dampak. Bertambahnya jumlah penduduk yang menganggur tercermin dari kenaikan pekerja yang dirumahkan dan jam kerja yang berkurang (Bank Indonesia, 2021).

Kondisi ini terbukti pada tahun 2021, di mana capaian TPAK kembali menurun menjadi 69,35 persen disebabkan kenaikan penduduk menganggur sebanyak 1.000 orang. Fenomena ini juga memperlihatkan penurunan suplai lapangan kerja. Pandemi *covid-19* yang terus berlangsung dengan munculnya varian baru *omicron* memengaruhi ketenagakerjaan dengan jumlah 440,5 ribu terkena dampak. Kondisi ini juga terlihat dari bertambahnya jumlah penduduk yang menganggur akibat dirumahkan atau mengalami pengurangan jam kerja (Bank Indonesia, 2022).

Membaiknya kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung kembali terlihat pada tahun 2022, di mana capaian TPAK meningkat menjadi 70,06 persen. Kenaikan serapan penduduk bekerja sebanyak 4,38 juta pekerja dinilai menjadi faktor penyebab meningkatnya capaian TPAK tersebut. Kondisi ini juga memperlihatkan peningkatan suplai lapangan kerja sejalan dengan semakin membaiknya perekonomian (Bank Indonesia, 2023). Berdasarkan data tersebut, capaian TPAK sebesar 70,16 persen pada tahun 2020 merupakan capaian tertinggi, sedangkan

capaian terendah diperoleh pada tahun 2017 yang hanya mampu menyentuh angka 67,83 persen (BPS Provisi Lampung, 2022).

Ketidakstabilan capaian TPAK di Provinsi Lampung juga disebabkan meningkatnya jumlah penduduk bukan angkatan kerja. Menurut Bank Indonesia (2018), terjadi pergeseran aktivitas penduduk angkatan kerja, yang kini lebih berfokus pada pendidikan dan pengelolaan rumah tangga. Data mencatat, meski fluktuatif namun penduduk bukan angkatan kerja cenderung meningkat rata-rata 0,018 persen selama tahun 2017–2022 (BPS Provinsi Lampung, 2022).

Namun, meski terjadi peningkatan penduduk bukan angkatan kerja, Provinsi Lampung masih berada dalam fase bonus demografi, yaitu kondisi dengan komposisi penduduk yang didominasi oleh kelompok usia produktif (15 - 64 tahun). Pada tahun 2022, rasio ketergantungan di Provinsi Lampung tercatat sebesar 46,21 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 46 penduduk usia non-produktif. Angka ini menegaskan bahwa Provinsi Lampung masih mengalami bonus demografi, mengingat jumlah penduduk usia produktif masih lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif (BPS Provinsi Lampung, 2023).

Peranan tenaga kerja produktif dalam perekonomian dinilai cukup krusial, karena peningkatan jumlah angkatan kerja akan meningkatkan kuantitas tenaga kerja. (Anfasa, 2021). Namun, kemampuan tenaga kerja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi perlu didukung dengan kualitas tenaga kerja dan ketersediaan input penunjang lainnya (Supartoyo dkk., 2013). Banyaknya penduduk usia produktif yang disertai dengan modal manusia yang berkualitas, pada gilirannya akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya jika kualitas penduduk usia produktif rendah, justru akan menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (BPS Provinsi Lampung, 2023).

Di sisi lain, seluruh kota/kabupaten di Provinsi Lampung menunjukkan rata-rata capaian TPAK yang beragam, seperti yang tergambar dalam grafik berikut ini:



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Gambar 1.5 Rata-Rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Lampung Tahun 2017–2022 (dalam Persen).

Rata-rata capaian TPAK terlihat dalam gambar 1.5, di mana Kabupaten Lampung Barat mendominasi dengan capaian paling tinggi sebesar 81,71 persen, sedangkan rata-rata capaian terendah terdapat pada Kota Bandar Lampung sebesar 66,09 persen atau selisih 15,62 persen. Kesenjangan yang cukup signifikan antara daerah dengan nilai TPAK tertinggi dan terendah menunjukkan bahwa capaian TPAK di Provinsi Lampung masih belum merata (BPS Provinsi Lampung, 2022).

Pengaruh positif TPAK terhadap pertumbuhan ekonomi ditemukan oleh Rahmawati (2019) yang mengidentifikasi adanya dorongan dari jumlah tenaga kerja yang bertambah. Studi menambahkan bahwa peningkatan tersebut memicu naiknya produktivitas dan berpengaruh pada peningkatan output, dan pada gilirannya menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sependapat dengan studi Keji (2021) yang membuktikan melalui estimasinya bahwa variabel TPAK merupakan penentu penting dan memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi Nigeria.

Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Hierdawati (2022) yang mengidentifikasi bahwa di Provinsi Jambi, TPAK tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Kondisi ini terlihat dari bertambahnya penduduk bukan angkatan kerja yang menyebabkan semakin rendahnya capaian TPAK. Perbedaan hasil juga

ditemukan oleh Afni et al. (2018) yang meneliti bahwa variabel TPAK pengaruhnya tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Jumlah tenaga kerja yang tersedia belum dibarengi dengan perluasan kesempatan kerja menjadi salah satu faktor yang menyebabkan fenomena ini terjadi.

Perekonomian memerlukan waktu dan proses bertahap untuk tumbuh secara positif, hal ini perlu didukung dengan kebijakan yang berkesinambungan dan pemantauan yang terarah. Peningkatan kualitas manusia, perbaikan pasar tenaga kerja, investasi berkelanjutan, dan peningkatan produktivitas akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dari sisi fiskal, kebijakan diarahkan pada optimalisasi kualitas pemasukan dan pengeluaran negara, serta manajemen resiko utang/biaya. Pemerintah perlu memastikan bahwa penerimaan negara dikelola secara efisien dan digunakan untuk membiayai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi (Bappenas, 2014 & 2019).

Latar belakang di atas diperkuat dalam teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dimodifikasi oleh Mankiw, Romer, dan Weil dalam model *Augmented Solow* bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari 3 (tiga) faktor, antara lain modal manusia, pertumbuhan *capital*, dan tenaga kerja (Mankiw dalam Supartoyo dkk., 2013) dan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab 2. Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal fisik, modal manusia, dan TPAK terhadap PDRB seluruh kota/kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2017-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah dari penelitian yang dibahas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaruh modal fisik terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2017-2022?
2. Bagaimana pengaruh modal manusia terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2017-2022?

3. Bagaimana pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2017-2022?
4. Bagaimana pengaruh modal fisik, modal manusia, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) secara bersama-sama terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2017-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui pengaruh modal fisik terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2017-2022.
2. Mengetahui pengaruh modal manusia terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2017-2022.
3. Mengetahui pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2017-2022.
4. Mengetahui pengaruh modal fisik, modal manusia, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) secara bersama-sama terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2017-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Instansi Pemerintahan
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi instansi pemerintahan daerah dan pusat dalam merancang kebijakan sebagai upaya mendorong peningkatan PDRB seluruh kota/kabupaten di Provinsi Lampung.

2. Ilmu Pengetahuan

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi bagi kemajuan khasanah pengetahuan dan wawasan dalam pengembangan ilmu dan teori ekonomi terutama mengenai peran pemerintah dalam peningkatan PDRB seluruh kota/kabupaten di Provinsi Lampung.

3. Penelitian Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan rujukan untuk penelitian lebih lanjut terutama dalam mengkaji pengaruh modal fisik, modal manusia, dan TPAK terhadap PDRB seluruh kota/kabupaten di Provinsi Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Fungsi dan Peran Pemerintah

Pemerintah memainkan peranan krusial dalam seluruh sistem perekonomian yang digolongkan ke dalam 3 (tiga) kategori peran, antara lain (i) peranan alokasi, yakni tugas pemerintah mengusahakan pengalokasian sumber ekonomi dengan efisien; (ii) peranan distribusi, yakni tugas pemerintah menyelenggarakan pendistribusian pendapatan sebagai upaya menciptakan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat; serta (iii) peranan stabilisasi, yakni tugas pemerintah memastikan stabilitas ekonomi terjaga melalui peningkatan kesempatan kerja dan stabilisasi harga barang (Mangkoesoebroto, 1995).

Salah satu upaya memperkuat sendi perekonomian dapat ditempuh melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas manusia, investasi berkelanjutan, dan perbaikan pasar tenaga kerja akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Bappenas, 2019). Mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan, serta mempertimbangkan tantangan dan potensi yang ada, dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut pemerintah baik pusat maupun daerah Provinsi Lampung telah menyiapkan sejumlah strategi dan kebijakan.

Pertama, peningkatan kualitas modal manusia. Pada dasarnya, pembangunan modal manusia harus dilaksanakan secara holistik dari ketiga bidang pembentuk IPM (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi), agar tidak terjadi kesenjangan antar bidang pembangunan (Bappenas, 2019). Dalam bidang kesehatan, pemerintah berfokus pada peningkatan layanan kesehatan utamanya penguatan layanan dasar melalui langkah preventif dan promotif yang diperkuat oleh optimalisasi teknologi dan inovasi (Bappenas, 2014 & 2019). Dari sisi anggaran melalui UU

Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, pemerintah memprioritaskan anggaran untuk program dan kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan. Namun, besaran alokasi anggaran tidak diatur di dalamnya dan pelaksanaan didasarkan pada penganggaran berbasis kinerja (mengalami perubahan dari Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

Berikutnya, di bidang pendidikan pemerintah fokus meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, didukung dengan peningkatan kemampuan bersaing dan produktivitas penduduk (Bappenas, 2014 & 2019). Dari perspektif anggaran melalui pasal 31 UUD 1945 ayat (1) dan (5), pemerintah memastikan kebutuhan pendidikan nasional terpenuhi dengan mengalokasikan anggaran sekurang-kurangnya 20% dari APBD dan APBN (PP Nomor 18 Tahun 2022).

Selanjutnya di bidang ekonomi, pemerintah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, melalui (i) perantara usaha dan dampak sosial; (ii) penguatan ekonomi keluarga; (iii) reforma agraria; dan (iv) pengelolaan kawasan hutan melalui skema perhutanan. Kemudian, upaya lainnya mencakup perluasan kesempatan dan partisipasi masyarakat kurang mampu dalam pembangunan; pemberian akses untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif; peningkatan dan diversifikasi keterampilan; kemudahan jangkauan pasar dan sumber biaya; serta perlindungan bisnis (Bappenas, 2014 & 2019).

Sejalan dengan kebijakan nasional, Provinsi Lampung juga telah menetapkan kebijakan daerah terkait optimalisasi kualitas masyarakat dengan, (i) perbaikan mutu dan aksesibilitas pendidikan menengah; (ii) perbaikan derajat kesehatan masyarakat; serta (iii) peningkatan penyerapan tenaga kerja (DJPb Provinsi Lampung, 2023). Kemudian, prioritas khusus diberikan kepada wilayah dengan IPM rendah untuk meningkatkan kualitas masyarakat, sehingga disparitas modal manusia antardaerah berkurang dan terlaksana pembangunan yang merata. Selain itu, kebijakan pengeluaran daerah memprioritaskan optimalisasi layanan masyarakat untuk mendorong mutu modal manusia meningkat (BPS, 2019).

Kedua, peningkatan tenaga kerja produktif dicapai dalam 2 (dua) langkah, yaitu (1) optimalisasi produktivitas dan keahlian pekerja, melalui (i) sertifikasi dan standarisasi kompetensi; (ii) proyek kolaborasi pemerintah dan industri/bisnis;

(iii) pelatihan berlandaskan keahlian; dan (iii) pola pendanaan pelatihan. Berikutnya, (2) perbaikan hubungan kerja dan relasi bisnis, melalui (i) optimalisasi investasi padat karya dengan perbaikan regulasi; (ii) peran pemerintah dalam mengatur sistem hubungan industrial; dan (iii) peraturan pengupahan sebagai payung hukum kebijakan (Bappenas, 2014 & 2019).

Sejalan dengan kebijakan nasional, Provinsi Lampung juga telah menetapkan kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan partisipasi tenaga kerja produktif. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan optimalisasi keahlian masyarakat melalui pembinaan/pelatihan (DJPb Provinsi Lampung, 2023).

Ketiga, investasi berkelanjutan yang didorong oleh peningkatan investasi modal fisik. Penguatan investasi dicapai melalui, (i) pembaharuan lingkungan bisnis dan investasi yang lebih kompetitif; serta (ii) optimalisasi investasi inklusif terutama dalam negeri. Untuk mencapai hal tersebut, sinkronisasi dan harmonisasi prosedur perizinan dilakukan untuk mendorong investasi swasta, sedangkan investasi pemerintah didukung melalui efisiensi investasi dan pembangunan infrastruktur (Bappenas, 2014 & 2019).

Sejalan dengan kebijakan nasional, sebagai salah satu prioritas pembangunan Provinsi Lampung telah memfokuskan aspek investasi berkelanjutan. Kebijakan ekonomi daerah akan difokuskan pada peningkatan investasi baru, baik dalam maupun luar negeri. Pembangunan infrastruktur juga digerakkan untuk untuk menyokong investasi Provinsi Lampung. Selain itu, dilakukan pemetaan peluang investasi di Provinsi Lampung, seperti pengembangan area khusus dan area bisnis lainnya; pengembang kawasan terintegrasi di Bakauheni; serta pengoptimalan sisi investasi melalui Forum Investasi Lampung (FOILA) (BPS, 2023).

Teori endogen menjelaskan bahwa pemerintah memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Secara proporsional dan efektif peran tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengelolaan pengeluaran pemerintah (Hanifah dan Yulhendri, 2022). Pengeluaran pemerintah merupakan langkah pemerintah untuk mengelola perekonomian menggunakan perangkat anggaran (Sukirno dalam Wahyudi, 2020). Menurut Mangkoesobroto (1995),

besaran biaya yang perlu dibelanjakan pemerintah untuk menyelenggarakan kebijakan dapat dilihat dari pengeluaran pemerintah. Semakin produktif belanja pemerintah suatu wilayah akan memengaruhi perekonomian bergerak menuju arah yang lebih baik (Lubis dalam Hanifah dan Yulhendri, 2022).

Dari perspektif fiskal, arah pelaksanaan kebijakan adalah untuk memelihara stabilitas ekonomi dan memacu inklusivitas pertumbuhan yang berkelanjutan, serta memperhatikan kesinambungan dalam keberjalanannya. Arah ini diterapkan melalui optimalisasi kualitas pemasukan dan pengeluaran negara, serta manajemen resiko utang/biaya. Melalui kinerja perekonomian yang kuat dan stabil diharapkan akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Bappenas, 2014 & 2019). Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, keberlangsungan program dan kebijakan perlu diiringi dengan regulasi dan kebijakan yang kondusif, rancangan program yang terukur dan menyeluruh, serta evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan. Keseluruhan langkah strategis tersebut dapat dicapai oleh pemerintahan pusat dan daerah bersama dengan sektor swasta, masyarakat, dan pelaku ekonomi lainnya.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu elemen penting dalam menganalisis kinerja perekonomian wilayah adalah pertumbuhan ekonomi yang diartikan sebagai peningkatan output perekonomian secara keseluruhan (Case and Fair, 2007). Todaro dalam Maimunah dan Emalia (2015) akan bahwa pertumbuhan ekonomi menggambarkan kemampuan suatu negara dalam memfasilitasi beragam kebutuhan ekonomi bagi masyarakat. Lebih lanjut pandangan terkait pertumbuhan ekonomi juga dikemukakan oleh Sukirno dalam Anfasa (2021) yang mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai isi di mana kapasitas suatu perekonomian dalam menghasilkan barang maupun jasa meningkat.

2.1.2.2 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Prinsip dasar ekonomi makro menuturkan bahwa pengukuran pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bagi tataran daerah serta Produk Domestik Bruto (PDB) bagi tataran nasional (Hanifah

dan Yulhendri, 2022). Mankiw et al. (2014) menambahkan PDB adalah ukuran kinerja terbaik untuk menilai perekonomian dikarenakan kemampuannya dalam mengestimasi output barang/jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian secara keseluruhan.

PDRB dideskripsikan sebagai keseluruhan nilai akhir barang/jasa yang diproduksi oleh berbagai segmen usaha pada wilayah tertentu (Bank Indonesia, 2022). Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (2022), secara konseptual terdapat 3 (tiga) cara untuk menghitung PDRB, antara lain berdasarkan pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran.

1. Pendekatan Produksi

Berdasarkan pendekatan ini, PDRB dideskripsikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang/jasa yang diproduksi oleh berbagai segmen usaha pada wilayah dan periode tertentu (biasanya satu tahun), yang diuraikan menjadi 17 lapangan usaha, antara lain: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah serta Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estate; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta (17) Jasa Lainnya.

Pendekatan ini menghitung pendapatan per kapita masyarakat, serta mengukur kinerja dan struktur ekonomi wilayah. Selain itu, PDRB pendekatan produksi juga menunjukkan kapasitas dan potensi pengelolaan sumber daya daerah (BPS Provinsi Lampung, 2023).

2. Pendekatan Pengeluaran

Berdasarkan pendekatan ini, PDRB dijelaskan berkenaan dengan alokasi nilai tambah bruto yang dihasilkan suatu daerah. Angka tersebut mengukur alokasi penggunaan nilai tambah bruto untuk pengeluaran konsumsi, investasi, dan kebutuhan barang/jasa dari luar wilayah.

Dengan demikian, pengkategorian PDRB berdasarkan pengeluaran diuraikan menjadi 7 kelompok, antara lain (1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT); (2) Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT); (3) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P); (4) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB); (5) Perubahan Inventori; (6) Net Ekspor Total (dihitung dengan mengurangkan ekspor total dan impor total, di 13 provinsi dihitung sebagai selisih antara ekspor luar negeri dikurangi impor luar negeri dan net ekspor antar daerah) (BPS Provinsi Lampung, 2023).

3. Pendekatan Pendapatan

Berdasarkan pendekatan ini, PDRB dideskripsikan sebagai keseluruhan balas jasa yang didapatkan oleh seluruh input produksi pada wilayah dan periode tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa ini mencakup gaji dan upah, laba, bunga, dan sewa tanah, seluruhnya belum dikurangi pajak langsung lainnya dan pajak penghasilan, serta depresiasi dan pajak tak langsung neto (pajak tak langsung dikurang subsidi).

PDRB beserta agregat turunannya ditampilkan dalam 2 (dua) jenis penilaian, antara lain (i) PDRB ADHK (atas dasar harga konstan), yaitu diukur berdasarkan tahun dasar dan penggunaannya untuk mengamati pertumbuhan ekonomi riil atau tanpa pengaruh harga; (ii) PDRB ADHB (atas dasar harga berlaku), yaitu diukur didasarkan pada harga tahun berjalan dan penggunaannya untuk memahami struktur perekonomian dan kapasitas sumber daya suatu wilayah (Bank Indonesia, 2022).

2.1.2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Model Pertumbuhan *Augmented Solow*

Salah satu teori dalam cakupan bahasan pertumbuhan ekonomi adalah model pertumbuhan Solow yang mengungkapkan bahwa 2 (dua) elemen utama dalam menetapkan pertumbuhan ekonomi suatu negara meliputi *labor* (tenaga kerja) dan *capital* (modal) (Hendarmin, 2019). Lebih lanjut, model ini memperlihatkan bagaimana perekonomian dipengaruhi oleh peningkatan angkatan kerja, ketersediaan modal, dan keterbaruan teknologi, serta interaksinya dalam

memengaruhi tingkat output. Namun, teknologi dipandang sebagai residual dan bersifat eksogen (Mankiw dalam Nurwanda dan Rifai, 2018).

Sementara itu, untuk dapat menangkap dengan jelas peran sumber daya manusia dalam pertumbuhan ekonomi, model pertumbuhan neoklasik telah dimodifikasi oleh Mankiw, Romer dan Weil (MRW) (Hasyiyati and Sahara, 2020). Mereka memperluas model pertumbuhan Solow ke dalam model *Augmented Solow* (model Solow yang ditambah), di mana mereka menambahkan variabel akumulasi modal manusia secara eksplisit ke dalam fungsi produksi. Secara teoritis Mankiw, Romer, dan Weil mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari 3 (tiga) faktor, meliputi modal manusia, pertumbuhan *capital*, dan tenaga kerja (Mankiw et al, 1992).

Estimasi model *Augmented Solow* terbukti memiliki hasil lebih baik daripada model neoklasik (Mankiw dalam Supartoyo dkk., 2013). Dalam hal ini, Mankiw dalam Kazmi, et al. (2017) mengatakan bahwa model Solow ditambah dengan modal fisik dan manusia lebih efektif dalam menggambarkan perbedaan pertumbuhan antar negara, dan sebagian besar negara berkumpul pada tingkat yang diprediksi oleh model *Augmented Solow*.

2. Spesifikasi Model Pertumbuhan *Augmented Solow*

Berdasarkan model pertumbuhan *Augmented Solow*, output (Y) ditentukan oleh komponen akumulasi modal fisik (K), tenaga kerja (L), modal manusia (H), dan tingkat teknologi (A), yang direpresentasikan dalam fungsi produksi Cobb Douglas berikut ini (Mankiw et al, 1992):

$$Y(t) = K(t)^\alpha H(t)^\beta (A(t)L(t))^{1-\alpha-\beta} \quad (1)$$

dimana Y adalah output, K menunjukkan modal fisik, H adalah modal manusia, L menunjukkan tenaga kerja, A mewakili tingkat teknologi, serta α , β dan $(1-\alpha-\beta)$ masing-masing adalah elastisitas modal fisik terhadap output, elastisitas modal manusia terhadap output, dan elastisitas tenaga kerja terhadap output.

Tenaga kerja (L) dan tingkat teknologi (A) didefinisikan lebih lanjut sebagai berikut:

$$L_t = L_0 e^{nt} \quad (2)$$

$$A_{t=0} = A_0 e^{gt} \quad (3)$$

Dengan L adalah tenaga kerja yang tumbuh pada tingkat n , A adalah tingkat kemajuan teknologi yang diharapkan konstan dilambangkan dengan g .

Kemudian, dalam model ini diasumsikan bahwa $\alpha + \beta < 1$ yang berarti terjadi penurunan kembali atas semua modal (Apabila $\alpha + \beta = 1$, berarti terjadi skala hasil tetap dalam faktor-faktor yang dapat direproduksi. Begitu juga jika $\alpha + \beta > 1$ yang berarti terjadi peningkatan kembali atas semua modal) (Mankiw et al. dalam Fathy and Safijillin, 2019). Secara umum model ini masih mempertahankan asumsi-asumsi dasar model Solow. Dalam model pertumbuhan Solow, jika variabel modal dan tenaga kerja dianalisis secara terpisah maka digunakan asumsi *diminishing returns to scale* (skala yang terus berkurang), sedangkan *constant returns to scale* (skala hasil tetap) digunakan apabila keduanya dianalisis bersamaan (Todaro and Smith dalam Nurwanda dan Rifai, 2018). Selain itu, Mankiw et al (1992) juga mengasumsikan bahwa sumber daya manusia mengalami depresiasi pada tingkat yang sama dengan depresiasi modal fisik.

Terdapat 3 (tiga) asumsi penting tambahan yang disampaikan oleh Mankiw et al. dalam Hasyati and Sahara (2020), antara lain:

1. Selain modal fisik, penanaman modal juga melibatkan peran modal manusia.
2. Kedua jenis modal tersebut mempunyai konstanta yang sama dengan tingkat penyusutan pada δ .
3. Output yang diproduksi dapat diinvestasikan atau dikonsumsi dalam wujud modal manusia maupun modal fisik.

3. Model Pertumbuhan Endogen

Untuk melihat peran pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui variabel bebas yang digunakan, *Endogenous Growth Theory* ditambahkan dalam penelitian ini. Teori ini menyatakan urgensi modal manusia dan teknologi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, di samping tenaga kerja dan modal fisik (Susetyo dkk., 2018). Lebih lanjut, Barro dalam Gruzina et al. (2021) menyatakan bahwa teori pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh kebijakan pemerintah.

Peran penting pemerintah dalam membangun kualitas manusia dan pengembangan produktivitas tidak terlepas dari kebijakan pengeluaran pemerintah untuk modal fisik, tenaga kerja, serta modal manusia (Susetyo dkk., 2018). Model endogen menuturkan adanya potensi pada pengeluaran modal fisik dan modal manusia untuk mendorong kenaikan produktivitas secara signifikan guna mengimbangi penurunan hasil. Pada gilirannya, peran investasi tersebut akan menstimulasi pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang (Todaro and Smith dalam Hutami dan Riani, 2022).

2.1.3 Modal Fisik

2.1.3.1 Definisi Modal Fisik

Modal fisik (*physical capital*) didefinisikan sebagai seluruh biaya atau pengeluaran yang dapat meningkatkan pasokan barang modal atau menciptakan modal baru (Mankiw dalam Sja'fii, 2010). Menurut Sukirno dalam Sufriyandi et al. (2022), investasi fisik didefinisikan sebagai kegiatan pembelanjaan atau penyediaan pasokan modal serta alat produksi untuk mengoptimalkan kapasitas produksi barang/jasa suatu perekonomian.

Model *Augmented Solow* menekankan pentingnya modal fisik dalam proses pertumbuhan (Mankiw et al., 1992). Model tersebut menilai bahwa peningkatan modal fisik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Amir et al., 2015). Investasi modal fisik akan menstimulasi pembentukan modal, peningkatan jumlah gedung, bangunan, serta peralatan lainnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan potensi output daerah dan dalam jangka panjang akan merangsang pertumbuhan ekonomi (Royan dalam Alayda dkk., 2022).

2.1.3.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Dalam kerangka PDB/PDRB kegiatan penanaman modal yang dimaksud merujuk pada penanaman modal berwujud fisik yang tergambar dalam PMTB (Hakiki et al., 2022). PMTB merupakan satu di antara komposisi penyusun PDRB, di mana PMTB mencerminkan kinerja investasi modal fisik pada suatu daerah (Maimunah dan Emalia, 2015).

PMTB diartikan sebagai serangkaian kegiatan penyediaan, pembelian, dan pembuatan barang modal baik hasil domestik maupun impor bekas pakai (Maimunah dan Emalia, 2015). Sejalan dengan hal tersebut, BPS Provinsi Lampung (2022) menyatakan bahwa barang modal tersebut merupakan segala jenis barang yang dimanfaatkan dalam operasional produksi dan memiliki periode pakai paling sedikit 1 (satu) tahun.

2.1.3.3 Komponen PMTB

Barang modal PMTB merupakan segala jenis barang yang dimanfaatkan dalam operasional produksi dan memiliki periode pakai paling sedikit 1 (satu) tahun, meliputi peralatan angkut, mesin, dan bangunan. Restorasi skala besar untuk peningkatan kapasitas barang, perubahan bentuk, dan perpanjangan usia pakai juga termasuk dalam komponen PMTB. PMTB dikategorikan dalam 6 (enam) sub-komponen pembentukan modal, meliputi Bangunan/ Konstruksi; Mesin dan Peralatan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; Cultivated Biological Resources (CBR) dan Produk Kekayaan Intelektual (BPS Provinsi Lampung, 2022). Selain itu, peningkatan jumlah modal dari sektor publik dan privat yang termasuk cakupan PMTB, di antaranya (BPS, 2023):

1. Perubahan kuantitas pada aset tetap baru atau bekas pakai yang mampu memproduksi secara berkala, termasuk juga aset intelektual
2. Biaya pengalihan hak milik atas aset nonfinansial yang diproduksi secara tidak langsung, meliputi produk dilindungi paten dan properti lahan.
3. Restorasi aset skala besar untuk peningkatan kapasitas barang dan perpanjangan usia pakai.

2.1.3.4 Metodologi Penghitungan PMTB

PMTB dihitung menggunakan 2 (dua) metode, antara lain (BPS Provinsi Lampung 2024):

1. Pendekatan Langsung, yaitu penjumlahan seluruh nilai PMTB dari berbagai segmen perekonomian. Pasokan modal ditaksir berdasarkan harga beli, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan barang modal meliputi pajak, ongkos instalasi, transportasi, dan lainnya.

2. Pendekatan Tidak Langsung (pendekatan melalui arus komoditas), yaitu pengukuran nilai barang yang diproduksi oleh berbagai segmen perekonomian dan sebagian ditujukan untuk aset modal, baik bersumber dari domestik maupun impor.

2.1.3.5 Manfaat Penggunaan PMTB

Investasi fisik atau PMTB memiliki peranan penting terhadap Produk Domestik Regional Bruto. PMTB dinilai berperan menjadi penggerak investasi untuk pertumbuhan dan pemerataan. PMTB juga digunakan sebagai indikator ICOR (*Investment Efficiency Ratio*) yang memberikan gambaran mengenai efisiensi dalam penggunaan modal fisik dan menjadi perangkat untuk mengestimasi keperluan investasi (Hakiki et al., 2022). Kemudian, PMTB juga menjadi dasar untuk merumuskan rencana pembangunan, seperti kebijakan investasi dan strategi penguatan sektor industri. PMTB merupakan instrumen yang dapat diandalkan untuk menilai dan mengukur kontribusi investor terhadap pencapaian pembangunan secara berkala (BPS dalam Hakiki et al., 2022).

Menurut Sukirno dalam Alexander and Kaluge (2019), manfaat dari aktivitas investasi diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Sebagai elemen pengeluaran agregat, investasi berperan penting dalam meningkatkan pendapatan nasional, permintaan agregat, dan peluang kerja.
2. Investasi yang menghasilkan penambahan modal akan memperbesar kemampuan produksi, sehingga akan merangsang kenaikan output serta memperluas peluang kerja.
3. Kemajuan teknologi selalu mengiringi investasi, sehingga peningkatan investasi mampu mendorong produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat.

2.1.4 Modal Manusia

2.1.4.1 Definisi Modal Manusia

Human capital (modal manusia) mengacu pada komponen manusia yang dinilai dapat mendorong kenaikan produktivitas, meliputi kesehatan, pendidikan, dan aspek lainnya. Modal manusia didefinisikan sebagai investasi produktif pada

aspek manusia melalui layanan kesehatan, pembiayaan pendidikan, dan pelatihan kerja yang mendorong terciptanya kesehatan, kompetensi, dan nilai moral (Todaro and Smith, 2011). Sedangkan, menurut Budiarti (2019) modal manusia adalah kesehatan, pengetahuan, dan kompetensi individu atau kelompok yang berguna untuk mengoptimalkan kualitas kerja.

Model *Augmented Solow* menekankan pentingnya modal manusia dalam proses pertumbuhan (Mankiw et al., 1992). *Human capital theory* menambahkan bahwa kesehatan, pendidikan, dan keterampilan merupakan bentuk dari modal manusia. Modal manusia memainkan peran krusial dalam aspek pendidikan dengan meningkatkan kapasitas ekonomi untuk mengadopsi teknologi dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Sementara itu, aspek kesehatan menjadi syarat utama produktivitas yang optimal. Kedua aspek tersebut dinilai sebagai parameter penting yang berkontribusi bagi perekonomian (Todaro dalam Anfasa, 2021).

2.1.3.1 Pengukuran Modal Manusia

Menurut standar konvensional, indikator modal manusia dikategorisasikan dalam 3 (tiga) pendekatan, yaitu output, biaya, dan pendekatan pendapatan. Selain ketiga pendekatan tersebut *United Nations Development Program (UNDP)* mempublikasikan pendekatan yang mengukur modal manusia dengan kerangka pikir *human development*. Pendekatan tersebut mengukur modal manusia menggunakan lebih banyak sub variabel sebagai indikator pengukuran, yakni kesehatan, pendidikan, dan *standar of living* (Budiarti, 2019).

Penggunaan indikator-indikator tersebut dinilai dapat mengukur modal manusia secara lebih akurat dan memiliki kemungkinan hubungan yang lebih kuat dengan modal manusia. Hasil akhir pengukuran dinyatakan dalam bentuk angka indeks dan dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Budiarti, 2019). Kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan output pembangunan, meliputi kesehatan, pendapatan, pendidikan, dan berbagai aspek kehidupan lainnya tergambar melalui capai IPM (BPS, 2023). Menurut *Human Development Report* dalam Anfasa (2021) semakin tinggi capaian IPM menandakan tingkat modal manusia yang semakin baik.

2.1.3.2 Metode Penghitungan IPM

Menurut UNDP, untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia serta mengetahui perkembangan dan taraf hidup penduduk suatu wilayah digunakan IPM sebagai alat ukurnya. IPM dipahami sebagai indeks komposit yang didasarkan pada 3 (tiga) aspek dasar pengukuran, antara lain (i) pengetahuan (*knowledge*); (ii) umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); dan (iii) standar hidup layak (*standard of living*) (BPS Provinsi Lampung, 2022).

Penghitungan IPM dapat diperoleh dengan terlebih dahulu melakukan penghitungan masing-masing aspek pembentuk IPM, antara lain (BPS, 2023):

1. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Dalam pengukuran aspek ini digunakan perkiraan jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan individu sepanjang hidupnya atau disebut indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Masa hidup yang lama dinilai sebagai aspek yang sangat berharga, yang hanya dapat tercapai apabila seseorang memperoleh pemeliharaan kesehatan dan asupan yang baik.

Penghitungan indeks Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) secara matematis sebagai berikut :

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$$

2. Dimensi Pengetahuan

Dalam pengukuran aspek ini digunakan tingkat pendidikan yang terdiri dari 2 (dua) indikator, antara lain (i) rata-rata lama sekolah, yakni banyaknya tahun bagi penduduk (kategori umur ≥ 25 tahun) untuk menyelesaikan pendidikan formalnya; (ii) harapan lama sekolah, yakni lama masa pendidikan bagi penduduk (kategori umur ≥ 7 tahun) yang diharapkan akan diterima di waktu mendatang. Dalam tahapan penghitungannya diterapkan bobot yang setara untuk kedua indikator tersebut dan kombinasi keduanya menghasilkan indeks pengetahuan.

Penghitungan indeks dimensi pengetahuan secara matematis sebagai berikut :

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

Indeks dimensi pengetahuan dihitung dari rata-rata aritmatik indeks HLS dan indeks RLS, dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2}$$

3. Dimensi Standar Hidup Layak

Dalam pengukuran aspek ini digunakan pengeluaran riil per kapita rata-rata setelah penyesuaian yang didasarkan pada 96 kebutuhan pokok. Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita digunakan dalam pengukuran standar hidup layak oleh UNDP, namun ketidaktersediaan data untuk skala provinsi dan kota/kabupaten menjadi alasan BPS melakukan penyesuaian dalam penghitungan.

Penghitungan indeks dimensi pengeluaran secara matematis sebagai berikut :

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

Kemudian, penghitungan setiap dimensi menerapkan batas minimum dan maksimum sesuai dengan standar UNDP, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Nilai Minimum dan Maksimum Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator Komponen IPM	Satuan	Maksimum	Minimum
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	Tahun	85	20
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	18	0
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	15	0
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rupiah	26.572.352**	1.007.436*

Sumber: BPS, 2023

Keterangan:

*Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah di tingkat kabupaten pada tahun 2010 (berdasarkan data empiris), yaitu di Tolikara-Papua

**Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi yang diproyeksikan untuk sebuah kabupaten hingga tahun 2025 (akhir RPJPN), yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan pada tahun 2025

Setelah itu, IPM dikalkulasi dengan metode agregasi geometrik (rata-rata ukur) dari ketiga dimensi yang telah disebutkan sebelumnya:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{UHH} \times I_{pengetahuan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

2.1.3.3 Klasifikasi Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai IPM terletak dalam rentang 0 hingga 1 atau 0 hingga 100 dalam skala persen, di mana nilai indeks yang semakin mendekati 1 atau 100 mengindikasikan tingkat modal manusia yang semakin berkualitas. Kemudian untuk mengategorikan wilayah dengan kesamaan karakteristik pencapaian modal manusia, maka dilakukan pengelompokan ke dalam 4 (empat) kategori, antara lain (BPS, 2023):

1. Kelompok IPM dengan kategori “sangat tinggi” : $IPM \geq 80$
2. Kelompok IPM dengan kategori “tinggi” : $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok IPM dengan kategori “sedang” : $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok IPM dengan kategori “rendah” : $IPM < 60$

2.1.3.4 Manfaat Penggunaan IPM

IPM merupakan parameter statistik yang berguna dalam peninjauan perkembangan capaian modal manusia suatu wilayah. Perkembangan IPM untuk skala nasional, provinsi, serta kota/kabupaten telah dipublikasikan secara berkala sejak tahun 2014. Hal ini memudahkan masing-masing wilayah untuk memahami gambaran sumber daya manusia yang dimiliki, termasuk pencapaian hasil, laju perkembangan, status, dan kesenjangan antarwilayah (BPS, 2020). Tersedianya data IPM bermanfaat untuk menunjukkan bahwa suatu wilayah dapat mencapai kinerja yang baik meski dihadapkan dengan rendahnya pendapatan. Sebaliknya, tingginya pendapatan belum tentu berbanding lurus dengan tingginya capaian pembangunan manusia (Todaro and Smith, 2011).

Dalam konteks pengambilan kebijakan, IPM menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh otoritas terkait untuk merancang strategi dan program yang efektif guna meningkatkan kemajuan pembangunan modal manusia masing-

masing wilayah (BPS, 2022). Dalam aspek pembiayaan, IPM berperan dalam penetapan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan tujuan kapasitas finansial antarwilayah merata dan mampu menyokong proyek-proyek pembangunan. Sementara itu, IPM juga digunakan dalam penghitungan dan pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) yang bertujuan mestimulasi terciptanya masyarakat yang sejahtera (BPS, 2021).

2.1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Dilihat dari aspek kuantitas, tenaga kerja merupakan satu di antara elemen yang berpengaruh pada tingkat pendapatan nasional (Prameswari dkk., 2021). Menurut Hartati (2021), peningkatan tenaga kerja produktif dapat berkontribusi pada peningkatan output. Todaro and Smith (2011) juga mengungkapkan pemikiran serupa bahwa pertumbuhan ekonomi dapat distimulasi melalui kontribusi pertumbuhan tenaga kerja.

Kontribusi penduduk usia produktif dalam kegiatan perekonomian dapat diukur dengan TPAK, yaitu perbandingan antara total keseluruhan angkatan kerja dan total penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam persentase.

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Penduduk usia kerja merujuk pada individu dengan usia ≥ 15 tahun dan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Masyarakat usia produktif yang sedang bekerja, menganggur, serta memiliki pekerjaan tetapi tidak aktif dalam periode tertentu dikategorikan dalam angkatan kerja. Sedangkan, masyarakat yang pasif dalam aktivitas perekonomian, mencakup individu yang menjalankan aktivitas pendidikan, pengelolaan rumah tangga, atau aktivitas lainnya dikategorikan menjadi bukan angkatan kerja (BPS Provinsi Lampung, 2023).

TPAK dinilai sebagai indikator ketenagakerjaan yang mampu mencerminkan proporsi relatif dari tenaga kerja yang berpartisipasi memproduksi barang/jasa dalam perekonomian, di mana nilai TPAK yang lebih tinggi mengindikasikan

bahwa lebih banyak penduduk usia kerja yang aktif berkontribusi dalam aktivitas ekonomi (DJPb Provinsi Lampung, 2023).

Tingginya nilai TPAK juga menandakan adanya peluang kerja yang tinggi bagi masyarakat, sebaliknya rendahnya nilai TPAK mengindikasikan peluang kerja yang sempit bagi masyarakat dalam kelompok usia kerja tersebut. Oleh karena itu, TPAK dinilai menjadi elemen yang berpengaruh pada capaian output yang dihasilkan suatu aktivitas ekonomi. Di mana, peningkatan pada output akan terwujud seiring dengan bertambahnya penduduk produktif yang berkontribusi, dan pada akhirnya akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan PDRB (Arsyad dalam Sufriyandi et al., 2022).

Menurut model *Augmented Solow* ketenagakerjaan menjadi unsur penting yang menyokong pertumbuhan ekonomi (Mankiw et al., 1992). Perubahan kuantitas tenaga kerja akan terjadi seiring adanya dinamika demografi yang terus berlangsung (Sufriyandi et al., 2022). Kapasitas dalam menghasilkan output berkorelasi positif dengan penambahan jumlah penduduk bekerja. Kemudian, peningkatan output akan memacu perekonomian bertumbuh melalui stimulasi tingkat penawaran agregat. Adapun kemampuan tenaga kerja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan sistem perekonomian dalam menghadapi penambahan pekerja dan memanfaatkannya secara produktif. Maka, kualitas tenaga kerja, akumulasi modal yang cukup, serta ketersediaan komponen pendukung lainnya sangat dibutuhkan (Supartoyo dkk., 2013).

2.2 Tinjauan Empiris

Penulis terlebih dahulu mengidentifikasi studi-studi sebelumnya yang relevan dengan pembahasan yang diteliti sebagai landasan untuk memulai penelitian ini, kemudian ringkasan penelitian tersebut ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Tinjauan Empiris

No	Peneliti	Judul	Metode dan Variabel	Hasil
1.	Wahyudi Manurung,	Determinan Pertumbuhan	Variabel: PDRB ADHK sebagai	Hasil estimasi menunjukkan bahwa IPM,

	Muhammad Fajar, dan Noviar (2022)	Ekonomi di Provinsi Banten	<p>proksi pertumbuhan ekonomi (Y), IPM (X1), jumlah tenaga kerja, derajat keterbukaan perdagangan (X2), PMTB (X3), dan realisasi belanja pemerintah (X4).</p> <p>Metode: Analisis regresi data panel</p>	jumlah tenaga kerja, dan PMTB berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, derajat keterbukaan perdagangan dan realisasi belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.
2.	Wasiaturrahma dan Nanda Chairunissa (2022)	Endogenous Growth Factors in Four Categories of Countries Based on HDI	<p>Variabel: PDB ADHK sebagai proksi pertumbuhan ekonomi (Y), IPM sebagai proksi modal manusia (X1), <i>Global Innovation Index</i> (X2), angkatan kerja (X3), dan PMTB sebagai proksi modal fisik (X4).</p> <p>Metode: Analisis regresi data panel</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM, angkatan kerja, GII, dan PMTB berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3.	Rayhana Salsabella Pratiwi (2021)	Analisis Pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019	<p>Variabel: PDRB (Y), Investasi dengan proksi PMTB (X1), modal manusia dengan proksi IPM (X2), serta pengeluaran pemerintah dengan proksi belanja tidak langsung (X3), dan belanja langsung (X4).</p> <p>Metode: Analisis regresi data panel</p>	Hasil studi menunjukkan bahwa PMTB, IPM, dan belanja langsung berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Sedangkan, Belanja Tidak Langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.
4.	Yulia Octavia Rahmawati (2019)	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di	<p>Variabel: Pertumbuhan Ekonomi (Y), IPM (X1), TPAK (X2), serta Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan (X3).</p> <p>Metode: Analisis Vector Autoregression (VAR)</p>	Hasil studi ini menunjukkan bahwa IPM, TPAK, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

		Indonesia Periode 1995- 2017		
5.	Sunday Anderu Keji (2021)	Human Capital and Economic Growth in Nigeria	Variabel: PDB (Y), PMTB (X1), TPAK (X2), pendaftaran siswa (X3), total angkatan kerja (X4), dan pengeluaran pemerintah (X5). Metode: Autoregressive Regressive Distributed Lag dan Kointegrasi Johansen	Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara parsial modal manusia (dengan proksi tingkat pendaftaran siswa, dan TPAK), modal fisik (dengan proksi PMTB), dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nigeria. Sedangkan, total angkatan kerja memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nigeria.
6.	Eny Lestari Widarni dan Suryaning Bawono (2021)	Human Capital, Technology, and Economic Growth: A Case Study of Indonesia	Variabel: PDB riil (Y), modal manusia (X1), TPAK (X2), modal fisik dengan proksi PMTB (X3), dan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan teknologi (X4). Metode: Autoregressive Regressive Distributed Lag Model	Berdasarkan hasil estimasi, modal manusia (X1), TPAK (X2), modal fisik dengan proksi PMTB (X3), dan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan teknologi (X4) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
7.	Dr. Amtul Hafeez (2019)	Human Capital and Economic Growth: Evidences from Pakistan.	Variabel: Pertumbuhan PDB (Y), belanja sektor publik untuk kesehatan (X1), belanja publik untuk pendidikan (X2), tingkat partisipasi pendidikan dasar (X3), tingkat partisipasi pendidikan menengah (X4), tingkat partisipasi pendidikan tinggi (X5), modal fisik (X6) diproksikan melalui stok modal, dan TPAK (X7). Metode: Autoregressive Regressive Distributed Lag Model dan Error correction model	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa modal manusia (diproksikan melalui belanja publik untuk kesehatan, belanja publik untuk pendidikan , pendaftaran pendidikan dasar, menengah dan tinggi), modal fisik (diproksikan melalui stok modal), dan TPAK seluruhnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
8.	Osni Erza dan Putri Aulia Febrianti	Pengaruh Belanja Pemerintah,	Variabel: Pertumbuhan Ekonomi (Y), Belanja Pemerintah	Hasil penelitian menemukan bahwa Belanja Pemerintah, TPAK, dan

(2022)	Produktivitas Tenaga Kerja, IPM, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	(X1), TPAK (X2), IPM (X3), Investasi PMA (X4), dan Investasi PMDN (X5). Metode: Analisis regresi linier berganda	IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. PMDN memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.	
9.	Muhammad Akbar Budiman, Siti Rohima, Anna Yulianita (2021)	Human Capital, Labour Force, And Economic Growth: Case Study of Across Regions in Indonesia	Variabel: Pertumbuhan Ekonomi (Y), Pengeluaran Pendidikan dan Kesehatan (X1), IPM (X2), dan TPAK (X3). Metode: Analisis regresi data panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Pengeluaran Pendidikan dan Kesehatan, IPM, dan TPAK berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
10.	EL Mostafa Bentour (2020)	The Effects of Human Capital on Economic Growth in The Arab Countries Compared to Some Asian and OECD Countries	Variabel: PDB riil (Y), stok modal fisik riil (X1), lapangan kerja (X2), IPM (X3). Metode: Analisis regresi data panel	Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa seluruh variabel, yaitu stok modal fisik riil, lapangan kerja, dan IPM berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sumber : diolah oleh peneliti tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.2 diperoleh temuan adanya perbedaan pada hasil studi terkait bagaimana variabel PMTB, IPM, dan TPAK memengaruhi PDRB dan temuan ini menunjukkan masih adanya *research gap*. Studi ini mengkombinasikan gagasan dari studi sebelumnya yang diperbarui dalam aspek periode, lokasi, dan penggunaan variabel. Dengan demikian, diharapkan studi ini dapat melengkapi dan memberikan referensi tambahan dari berbagai studi sebelumnya. Di samping itu, PDRB dan variabel yang berpengaruh terhadapnya, meliputi modal fisik (dengan proksi PMTB), modal manusia (dengan proksi IPM), dan TPAK belum banyak dikaji secara bersamaan. Studi ini merupakan salah satu upaya untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Rujukan utama penelitian ini adalah Manurung dkk. (2022), dengan 9 (sembilan) penelitian lainnya sebagai pendukung. Penelitian ini mengadopsi penggunaan

variabel PDRB ADHK, PMTB, dan IPM, kemudian penerapan metode analisis regresi data panel dan penggunaan model yang didasarkan pada model *augmented solow*, yang dijelaskan lebih lanjut dalam bab 3.

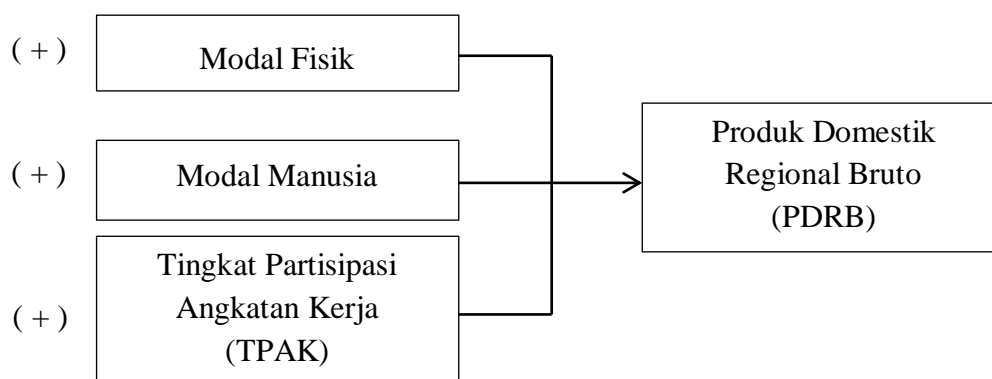
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modal fisik, modal manusia, dan TPAK terhadap PDRB seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Untuk menganalisis pengaruh tersebut, maka diterapkan regresi data panel sebagai metode analisis. Metode tersebut mengikuti studi Wasiaturrahma dan Chairunissa (2022), Manurung dkk. (2022), Pratiwi (2021), Erza dan Febrianti (2022), Budiman et al. (2021), dan Bentour (2020). Kemudian, penelitian ini menggunakan model ekonometrik yang didasarkan pada persamaan *Augmented Solow* yang dimodifikasi oleh Mankiw et al. (1992) dari fungsi Cobb-Douglas sebagai model dasar. Beberapa studi yang menggunakan model tersebut antara lain Manurung dkk. (2022) dan Bentour (2020).

Penelitian ini menggunakan PDRB ADHK sebagai variabel terikat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Penggunaan PDRB ADHK didasarkan pada penelitian Wasiaturrahma dan Chairunissa (2022), Manurung dkk. (2022), Pratiwi (2021), Keji (2021), Widarni and Bawono (2021), dan Bentour (2020). Sementara untuk variabel bebas, penelitian ini menggunakan variabel modal fisik, modal manusia, dan TPAK. PMTB digunakan sebagai indikator yang mencerminkan modal fisik. Penggunaan PMTB terdapat dalam penelitian Wasiaturrahma dan Chairunissa (2022), Manurung dkk. (2022), Pratiwi (2021), Keji (2021), Widarni and Bawono(2021), Hafeez (2019), Bentour (2020).

Dalam berbagai penelitian, modal manusia diukur dengan indikator yang berbeda-beda dan IPM digunakan sebagai proksi variabel modal manusia dalam studi ini. Indikator IPM digunakan dalam studi Wasiaturrahma dan Chairunissa (2022), Manurung dkk. (2022), Pratiwi (2021), Rahmawati (2019), Widarni and Bawono(2021), Erza dan Febrianti (2022), Budiman et al. (2021), dan Bentour (2020). Kemudian, variabel TPAK yang digunakan mengikuti penelitian Rahmawati (2019), Keji (2021), Widarni and Bawono(2021), Hafeez (2019), Erza dan Febrianti (2022), Budiman et al. (2021). Penjelasan di atas menegaskan penerimaan penggunaan indikator dan variabel terpilih.

2.3 Kerangka Pemikiran

Didasarkan pada studi empiris dan landasan teori yang mendukung penelitian ini, hubungan antara variabel-variabel bebas dengan PDRB terlihat dalam skema berikut ini:



Sumber : diolah oleh peneliti tahun 2024

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir dalam gambar 2.1 menggambarkan pola hubungan regresi antara PDRB dengan modal fisik, modal manusia, dan TPAK, yaitu berhubungan positif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa PDRB seluruh kota/kabupaten di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh ketiga variabel bebas tersebut, pengaruh tersebut dijelaskan melalui pendekatan pengeluaran.

Modal fisik dinilai memengaruhi PDRB kota/kabupaten di Provinsi Lampung dengan arah positif. Secara teknis, kenaikan pasokan modal akan mendorong naiknya produktivitas dan kapasitas produksi barang/jasa. Kemudian, hal tersebut akan meningkatkan perluasan lapangan kerja yang kemudian akan berpengaruh pada kenaikan pendapatan masyarakat (Brilyawan dan Santosa, 2021). Kenaikan pendapatan akan merangsang peningkatan daya beli, sehingga berdampak pada meningkatnya konsumsi masyarakat. Kemudian, hal tersebut akan menstimulasi perekonomian bertumbuh (Arsyad dalam Sulistiawati, 2012).

Berikutnya, modal manusia dinilai memengaruhi PDRB kota/kabupaten di Provinsi Lampung dengan arah positif. Modal manusia melalui kenaikan IPM yang disusun dari 3 (tiga) dimensi dasar (kesehatan, pendidikan, dan *standar of*

living) memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan kapabilitas masyarakat (Rahmawati, 2019).

Melalui aspek pendidikan, modal manusia berperan dalam membangun kapasitas perekonomian dalam mengadopsi teknologi serta menciptakan kenaikan produktivitas penduduk. Sementara itu, aspek kesehatan menjadi syarat utama produktivitas yang optimal. Apabila masyarakat sehat, mereka memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang akan mendorong kenaikan produksi dan menstimulasi perekonomian bertumbuh (Anfasa, 2021). Kemudian, aspek standar hidup layak yang mencerminkan penduduk yang sejahtera akan mendorong peningkatan produktivitas melalui peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat (Haerani dan Rahman, 2021).

Peningkatan dimensi penyusun IPM secara keseluruhan akan berdampak pada membaiknya tingkat modal manusia, yang kemudian akan meningkatkan kapasitas penduduk sehingga mampu memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang layak. Kenaikan pendapatan akan merangsang peningkatan daya beli, sehingga berdampak pada meningkatnya konsumsi masyarakat. Hal tersebut akan mendorong pertumbuhan perekonomian (Arsyad dalam Sulistiawati, 2012).

Selanjutnya, TPAK dinilai memengaruhi PDRB kota/kabupaten di Provinsi Lampung dengan arah positif. Secara teknis, melalui peningkatan tenaga kerja produktif, TPAK akan meningkatkan pendapatan per kapita dan tingkat konsumsi. Perusahaan akan membayar sejumlah upah yang akan meningkatkan pendapatan dan tingkat konsumsi pekerja, sehingga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Arsyad dalam Sufriyandi et al., 2022).

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga modal fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2017-2022.
2. Diduga modal manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2017-2022.
3. Diduga tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2017-2022.
4. Diduga modal fisik, modal manusia, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2017-2022.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif merupakan jenis penelitian ini, yang dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh modal fisik, modal manusia, dan TPAK terhadap PDRB di kota/kabupaten Provinsi Lampung tahun 2017-2022. Dalam prosesnya dilakukan pengujian hipotesis dan analisis regresi, kemudian diambil kesimpulan penelitian berdasarkan hasil analisis tersebut.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menetapkan populasi 15 kota/kabupaten di Provinsi Lampung sebagai objek penelitian, antara lain (1) Lampung Barat; (2) Tanggamus; (3) Lampung Selatan; (4) Lampung Timur; (5) Lampung Tengah; (6) Lampung Utara; (7) Way Kanan; (8) Tulang Bawang; (9) Pesawaran; (10) Pringsewu; (11) Mesuji; (12) Tulang Bawang Barat; (13) Pesisir Barat; (14) Bandar Lampung; dan (15) Metro. Waktu penelitian adalah tahun 2017–2022, pemilihan periode tersebut dikarenakan data tersedia secara lengkap untuk 15 kota/kabupaten di Provinsi Lampung pada tahun 2017–2022.

3.3 Data dan Sumber Data

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, data tersebut bersumber dari *website* Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) serta Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (<https://lampung.bps.go.id/>). Penggunaan data kuantitatif dipilih sebagai jenis data dalam penelitian ini, yaitu data berupa angka yang dihasilkan dari proses pengukuran dan penghitungan (Widarjono, 2018).

Penelitian ini menggunakan PDRB sebagai variabel terikat, kemudian data PMTB sebagai proksi dari variabel modal fisik, data IPM sebagai proksi dari variabel modal manusia, dan data TPAK sebagai variabel bebas dalam kurun waktu 2017–2022. Rincian variabel tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Ringkasan Variabel Penelitian

Variabel	Simbol	Proksi	Periode	Satuan Ukuran	Sumber Data
Modal Fisik	MF	PMTB	Tahunan	Juta Rupiah	BPS Provinsi Lampung
Modal Manusia	MM	IPM	Tahunan	Indeks	BPS Provinsi Lampung
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	TPAK	TPAK	Tahunan	Persen	BPS Provinsi Lampung
Produk Domestik Regional Bruto	PDRB	PDRB	Tahunan	Juta Rupiah	BPS Provinsi Lampung

Sumber : diolah oleh peneliti tahun 2024

3.4 Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Modal Fisik

Penggunaan data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dipilih sebagai proksi variabel modal fisik dalam penelitian ini. Menurut BPS Provinsi Lampung (2022), PMTB adalah pembelian, pembuatan, dan penyediaan barang modal yang berguna selama operasional produksi dan memiliki periode pakai paling sedikit 1 (satu) tahun. Sebagai satu di antara komposisi penyusun PDRB, PMTB mencerminkan kinerja investasi modal fisik pada suatu daerah (Maimunah dan Emalia, 2015).

Data ini diperoleh dari BPS Provinsi Lampung, dengan lokasi penelitian 15 kota/kabupaten di Provinsi Lampung selama periode 2017–2022. Data tersebut merupakan data sekunder dengan satuan juta rupiah.

3.4.2 Modal Manusia

Penggunaan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipilih sebagai proksi variabel modal manusia dalam penelitian ini. Menurut BPS Provinsi Lampung

(2022), IPM dipahami sebagai indeks komposit yang didasarkan pada 3 (tiga) aspek dasar pengukuran, mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Perhitungan IPM diperoleh dengan menghitung indeks masing-masing dimensi yang telah dijelaskan pada Bab 2. Nilai IPM terletak dalam rentang 0 hingga 1 atau 0 hingga 100 dalam skala persen, di mana nilai indeks yang semakin mendekati 1 atau 100 mengindikasikan tingkat modal manusia yang semakin berkualitas.

Data ini diperoleh dari BPS Provinsi Lampung, dengan lokasi penelitian 15 kota/kabupaten di Provinsi Lampung selama periode 2017–2022. Data tersebut merupakan data sekunder berbentuk indeks.

3.4.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Penggunaan data TPAK dipilih sebagai variabel bebas terakhir dalam penelitian ini. Menurut DJPb Provinsi Lampung (2023), TPAK diartikan sebagai perbandingan antara total keseluruhan angkatan kerja dan total penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam persentase. TPAK dinilai sebagai indikator ketenagakerjaan yang mampu mencerminkan proporsi relatif dari tenaga kerja yang berpartisipasi memproduksi barang/jasa dalam perekonomian.

Data ini diperoleh dari BPS Provinsi Lampung, dengan lokasi penelitian 15 kota/kabupaten di Provinsi Lampung selama periode 2017–2022. Data tersebut merupakan data sekunder dengan satuan persen.

3.4.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Penggunaan PDRB ditetapkan sebagai variabel terikat dalam penelitian ini. PDRB merupakan parameter yang dapat mengukur pertumbuhan ekonomi untuk skala daerah provinsi maupun kabupaten/kota (Hanifah dan Yulhendri, 2022). Menurut Bank Indonesia (2022), PDRB dideskripsikan sebagai keseluruhan nilai akhir barang/jasa yang diproduksi oleh berbagai segmen usaha pada wilayah tertentu.

Data yang digunakan adalah nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Data ini diperoleh dari BPS Provinsi Lampung, dengan lokasi penelitian 15

kota/kabupaten di Provinsi Lampung selama periode 2017–2022. Data tersebut merupakan data sekunder dengan satuan juta rupiah.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis regresi linier berganda dengan regresi data panel menjadi metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini. Penelitian ini memanfaatkan aplikasi olah data *Eviews 10* sebagai alat analisis. Kemudian, untuk mencapai tujuan penelitian digunakan analisis statistik dengan penjelasan sebagai berikut:

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Sebagai langkah menyajikan deskripsi umum terkait karakteristik setiap variabel penelitian, maka dilakukan analisis statistik deskriptif mencakup *mean* (rata-rata), nilai minimum, dan maksimum (Widarjono, 2018). Kemudian, hasil deskripsi tersebut akan ditampilkan dalam bentuk tabel yang menunjukkan informasi tersebut untuk setiap variabel dalam penelitian.

3.5.2 Analisis Regresi Data Panel

Data Panel (*Panel Pooled Data*) merupakan kombinasi data *time series* dan *cross section*. Data didasarkan pada susunan waktu untuk data *time series*, serta data dihimpun pada waktu yang sama dari beberapa wilayah, perorangan, atau perusahaan untuk data *cross section* (Widarjono, 2018).

Menurut Widarjono (2018), pada dasarnya metode data panel memiliki keunggulan dalam penggunaannya. *Pertama*, dengan kombinasi 2 (dua) jenis data dalam data panel, maka *degree of freedom* yang dihasilkan akan lebih besar karena lebih banyak data yang tersedia. *Kedua*, penggabungan informasi dari kedua jenis data dalam data panel menyebabkan masalah penghilangan variabel (*omitted-variable*) dapat diatasi.

Persamaan model dengan menggunakan data *cross section* sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \varepsilon_i \dots \dots \dots i = 1, 2, 3, \dots, N$$

di mana N adalah banyaknya data observasi.

Sedangkan persamaan model dengan *time series* sebagai berikut :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \varepsilon_t, \dots, t = 1, 2, 3, \dots, T$$

di mana T adalah banyaknya waktu.

Penelitian ini menggunakan model ekonometrik yang didasarkan pada persamaan *Augmented Solow* yang dikemukakan oleh Mankiw et al. (1992) sebagai model dasar secara teoritis. Model ini juga digunakan dalam penelitian Manurung, dkk (2022) sebagai rujukan utama. Selanjutnya, model tersebut diadopsi sesuai dengan penelitian yang dilakukan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Secara statistik, sebagai langkah standarisasi pada ukuran data penelitian, maka dilakukan transformasi persamaan regresi ke dalam logaritma natural (L) dikarenakan adanya satuan ukur yang berbeda antar variabel. Transformasi logaritma natural dilakukan untuk mereduksi nilai variabel, dengan tujuan terbentuk persamaan nilai dalam setiap variabel yang digunakan (Gujarati dalam Hendarmin dan Kartika, 2019).

Persamaan model regresi data panel dalam bentuk logaritma natural dituliskan sebagai berikut:

$$LY_{it} = \beta_0 + \beta_1 LX_{1it} + \beta_2 LX_{2it} + \beta_3 LX_{3it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

Dengan demikian, setelah memasukkan variabel penelitian dalam persamaan (2), disajikan model regresi data panel dalam persamaan berikut ini:

$$LPDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 LMF_{1it} + \beta_2 LMM_{2it} + \beta_3 LTPAK_{3it} + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

Keterangan :

LPDRB : Log Natural PDRB (dalam juta rupiah)

LMF : Log Natural Modal Fisik (dalam juta rupiah)

LMM : Log Natural Modal Manusia (dalam indeks)

LTPAK : Log Natural TPAK (dalam persen)

β_0 : Konstanta (*intercept*)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi

ε_{it} : *error term*

i : 1, 2, . . . n, menunjukkan jumlah kabupaten/kota di Provinsi Lampung

t : 1, 2, . . . t, menunjukkan periode 2017-2022

Dalam estimasi model regresi data panel, dapat diaplikasikan beberapa metode dengan penjelasan sebagai berikut (Widarjono, 2018):

3.5.2.1 Metode *Common Effect*

Metode ini dilandaskan pada estimasi data panel yang melakukan penggabungan data *time series* dan *cross section*, namun di dalamnya tidak mempertimbangkan adanya individu dan waktu yang berbeda. Penggunaan *common effect model* dengan pengaplikasian metode OLS dipilih sebagai penyelesaian estimasi tersebut. Dengan model persamaan regresi, sebagai berikut:

$$LY_{it} = \beta_0 + \beta_1 LX_{1it} + \beta_2 LX_{2it} + \varepsilon_{it}$$

3.5.2.2 Metode *Fixed Effect*

Adanya intersep yang berbeda dalam persamaan regresi data panel menjadi asumsi utama dalam metode ini. Penggunaan *fixed effect model* dilakukan dengan memasukkan variabel dummy untuk menangkap individu yang memiliki nilai intersep berbeda. Dengan model persamaan regresi, sebagai berikut:

$$LY_{it} = \beta_0 + \beta_1 LX_{1it} + \beta_2 LX_{2it} + \varepsilon_{it}$$

3.5.2.3 Metode *Random Effect*

Metode ini merupakan teknik estimasi data panel yang mempertimbangkan kemungkinan korelasi pada variabel gangguan dalam lintas individu dan lintas waktu. Metode ini dilandaskan pada pemahaman bahwa terdapat 2 (dua) unsur dalam variabel gangguan v_{it} , yaitu secara keseluruhan μ_i (perpaduan data panel) dan individu e_{it} . Lebih lanjut, variabel gangguan μ_i tetap konsisten dalam lintas

waktu, namun mengalami perbedaan dalam lintas individu. Dengan model persamaan regresi, sebagai berikut:

$$LY_{it} = \bar{\beta}_0 + \beta_1 LX_{1it} + \beta_2 LX_{2it} + v_{it}$$

3.5.3 Uji Spesifikasi Model

Berdasarkan 3 (tiga) jenis metode estimasi yang telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya dilakukan uji spesifikasi model sebagai langkah penentuan model estimasi data panel yang paling sesuai, dengan langkah uji antara lain (Widarjono, 2018):

3.5.3.1 Uji Chow

Dalam penentuan model terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Common Effect Model* (CEM), maka digunakan uji chow dengan hipotesis pengujian, yakni:

$$\begin{array}{ll} H_0 : \text{Model } \textit{Common Effect} & \text{(menerima } H_0) \\ H_a : \text{Model } \textit{Fixed Effect} & \text{(menolak } H_0) \end{array}$$

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Common effect model* lebih sesuai dibandingkan *fixed effect model*, apabila nilai Chi squares hitung (χ^2) lebih rendah dari nilai kritis Chi squares (χ^2).
- Fixed effect model* lebih sesuai dibandingkan *common effect model*, apabila nilai Chi squares hitung (χ^2) lebih tinggi dari nilai kritis Chi squares (χ^2).
- Apabila *fixed effect model* terpilih, maka perlu dilanjutkan langkah uji hausman untuk menentukan *fixed effect model* atau *random effect model* yang merupakan model terbaik.

3.5.3.2 Uji Hausman

Dalam penentuan model terbaik antara *Random Effect Model* (REM) atau *Fixed Effect Model* (FEM), maka digunakan uji hausman dengan hipotesis pengujian, yakni:

$$\begin{array}{ll} H_0 : \text{Model } \textit{Random Effect} & \text{(menerima } H_0) \\ H_a : \text{Model } \textit{Fixed Effect} & \text{(menolak } H_0) \end{array}$$

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Random effect model* lebih sesuai dibandingkan *fixed effect model*, apabila nilai Chi squares hitung (χ^2) lebih rendah dari nilai kritis Chi squares (χ^2).
- b. *Fixed effect model* lebih sesuai dibandingkan *random effect model*, apabila nilai Chi squares hitung (χ^2) lebih tinggi dari nilai kritis Chi squares (χ^2).

3.5.3.3 Uji Breusch Pagan – Lagrange Multiplier Test

Dalam penentuan model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Random Effect Model* (REM), maka digunakan uji BG – LM Test dengan hipotesis pengujian, yakni:

$$\begin{aligned} H_0 &: \text{Model } \textit{Common Effect} && (\text{menerima } H_0) \\ H_a &: \text{Model } \textit{Random Effect} && (\text{menolak } H_0) \end{aligned}$$

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Common effect model* lebih sesuai dibandingkan *random effect model*, apabila nilai probabilitas Breusch Pagan lebih tinggi dari $\alpha = 5\%$.
- b. *Random effect model* lebih sesuai dibandingkan *common effect model*, apabila nilai probabilitas Breusch Pagan lebih rendah dari $\alpha = 5\%$.

3.5.4 Uji Asumsi Klasik

Dalam memberikan penilaian dan memastikan bahwa hasil regresi terpilih merupakan estimasi dengan hasil terbaik dan layak dilakukan analisis, maka dilanjutkan proses uji asumsi klasik. Hasil regresi harus memenuhi kriteria (BLUE = *Best Linear Unbiased Estimator*) atau linier, tidak bias, serta memiliki varian yang minimum. Langkah uji dalam menganalisis masalah atau penyimpangan terhadap asumsi-asumsi klasik, apakah hal tersebut terjadi dalam model estimasi terpilih akan dijelaskan sebagai berikut (Widarjono, 2018):

3.5.4.1 Uji Normalitas

Langkah uji ini dilaksanakan sebagai identifikasi apakah residual hasil regresi terdistribusi secara normal. Hasil tersebut dapat diperoleh melalui Uji Jarque-Bera dengan asumsi bahwa terdapat sifat *asymptotic* dalam sampel besar. Nilai statistik Jarque-Bera akan sebesar 0 (nol), apabila distribusi residual adalah normal.

Adapun hipotesis dalam pengujian normalitas, yakni:

H_0 : Residu tersebar secara normal

H_a : Residu tersebar tidak normal

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Residual terdistribusi secara normal, apabila nilai probabilitas ρ dari statistik Jarque-Bera besar atau nilai statistik Jarque-Bera tidak signifikan.
- b. Residual tidak terdistribusi secara normal, apabila nilai probabilitas ρ dari statistik Jarque-Bera kecil atau nilai statistik Jarque-Bera signifikan.

3.5.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Langkah uji ini dilaksanakan sebagai identifikasi apakah heteroskedastisitas terjadi dalam suatu model regresi. Kondisi ketika variabel gangguan memiliki varian yang tidak tetap disebut sebagai heteroskedastisitas. Langkah uji dapat dilakukan menggunakan metode *Glejser*, yaitu regresi pada nilai absolut residual bersama variabel bebas.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Model tidak memiliki masalah heteroskedastisitas, apabila secara statistik probabilitas $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ adalah tidak signifikan.
- b. Model mengandung masalah heteroskedastisitas, apabila secara statistik probabilitas $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ adalah signifikan.

3.5.4.3 Uji Autokorelasi

Langkah uji ini dilaksanakan sebagai identifikasi apakah autokorelasi terjadi dalam suatu model regresi. Kondisi ketika antar variabel gangguan memiliki korelasi satu dengan lainnya disebut sebagai autokorelasi. Langkah uji dapat dilakukan menggunakan metode Durbin-Watson (DW). Adapun hipotesis dalam pengujian autokorelasi, yakni:

H_0 : tidak ada autokorelasi

H_a : ada autokorelasi

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Ketentuan Uji Autokorelasi

Nilai Statistik d	Hasil
$0 < d < d_L$	Menolak hipotesis nol; terdapat autokorelasi positif
$d_L < d < d_U$	Daerah ragu-ragu; tidak terdapat keputusan
$d_U < d < 4 - d_U$	Gagal menolak hipotesis nol; tidak ada autokorelasi positif/negative
$4 - d_U < d < 4 - d_L$	Daerah ragu-ragu; tidak terdapat keputusan
$4 - d_L < d < 4$	Menolak hipotesis nol; terdapat autokorelasi negatif

Sumber: Widarjono, 2018

Dengan demikian, indikasi masalah autokorelasi positif terlihat apabila nilai d semakin dekat dengan angka nol. Sedangkan, autokorelasi negatif terlihat apabila nilai d semakin dekat dengan angka 4.

3.5.4.4 Deteksi Multikolinieritas

Langkah uji ini dilaksanakan sebagai identifikasi apakah multikolinieritas terjadi dalam suatu model regresi. Kondisi ketika antar variabel bebas memiliki hubungan linier disebut sebagai multikolinieritas. Rendahnya nilai statistik t serta *standard error* yang tinggi menjadi indikasi awal masalah multikolinieritas. Langkah uji dapat dilakukan menggunakan perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu model regresi terindikasi masalah multikolinieritas apabila memiliki nilai $VIF > 0,90$.

3.5.5 Uji Hipotesis

Langkah pengujian ini bertujuan memverifikasi keakuratan karakteristik populasi yang didasarkan pada sampel data disebut sebagai uji hipotesis. Kegunaan pengujian ini adalah membantu dalam mengidentifikasi ketepatan data dan pengambilan kesimpulan dari hasil analisis. Beberapa langkah uji hipotesis dijelaskan sebagai berikut (Widarjono, 2018):

3.5.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Langkah pengujian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaruh atau hubungan variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial disebut sebagai uji t statistik.

Langkah uji dapat dilakukan menggunakan derajat kebebasan [$df = (n-k)$] serta tingkat kepercayaan 95%.

Sebagai langkah menentukan signifikansi setiap variabel bebas, pengujian satu arah (*one tailed*) diterapkan dalam penelitian ini. Pengujian mengacu pada nilai-nilai positif dan negatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat, apabila nilai $t_0 >$ nilai t_α atau nilai probabilitas $\rho < \alpha$ (0,05) sehingga H_0 ditolak atau menerima H_α .
- b. Variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat, apabila nilai $t_0 <$ nilai t_α atau nilai probabilitas $\rho > \alpha$ (0,05) sehingga H_0 diterima atau menolak H_α .

Kemudian uji t dalam penelitian ini menggunakan beberapa hipotesis, antara lain:

a) Modal Fisik

$H_0 : \beta_1 = 0$, modal fisik diduga tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2017-2022.

$H_\alpha : \beta_1 > 0$, modal fisik diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2017-2022.

b) Modal Manusia

$H_0 : \beta_2 = 0$, modal manusia diduga tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2017-2022.

$H_\alpha : \beta_2 > 0$, modal manusia diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2017-2022.

c) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

$H_0 : \beta_3 = 0$, TPAK diduga tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2017-2022.

$H_a : \beta_3 > 0$, TPAK diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2017-2022.

3.5.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Langkah pengujian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaruh atau hubungan variabel bebas dengan variabel terikat secara simultan disebut sebagai uji F. Langkah uji dapat dilakukan menggunakan derajat kebebasan $[df = (n-k)]$ serta tingkat kepercayaan 95%. Adapun uji F dalam penelitian ini menggunakan beberapa hipotesis, antara lain:

$H_0 : \beta_1; \beta_2; \beta_3; \beta_4 = 0$, seluruh variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2017-2022.

$H_a : \beta_1; \beta_2; \beta_3; \beta_4 \neq 0$, setidaknya 1 variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2017-2022.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara bersama – sama, apabila nilai $F_0 > \text{nilai } F_\alpha$, sehingga H_0 ditolak atau menerima H_a .
- b. Variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara bersama – sama, apabila nilai $F_0 < \text{nilai } F_\alpha$, sehingga H_0 diterima atau menolak H_a .

3.5.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Langkah pengujian ini bertujuan mengukur proporsi variasi total dari variabel terikat dapat dijelaskan oleh keseluruhan variabel bebas disebut dengan koefisien determinasi. R^2 memiliki nilai yang berkisar antara 0 hingga 1, di mana garis regresi semakin baik apabila hasilnya mendekati 1, hal ini mengindikasikan bahwa variabel mampu menjelaskan data sebenarnya. Kemudian, sebaliknya penelitian memiliki garis regresi yang kurang baik apabila hasilnya mendekati 0.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Modal fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di kota/kabupaten Provinsi Lampung pada tahun 2017–2022. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan modal fisik yang diwakili oleh PMTB akan berpengaruh pada meningkatnya PDRB di kota/kabupaten Provinsi Lampung.
2. Modal manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di kota/kabupaten Provinsi Lampung pada tahun 2017–2022. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan modal manusia yang diwakili oleh IPM akan berpengaruh pada meningkatnya PDRB di kota/kabupaten Provinsi Lampung.
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB di kota/kabupaten Provinsi Lampung pada tahun 2017–2022. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan TPAK tidak memiliki pengaruh terhadap meningkatnya PDRB di kota/kabupaten Provinsi Lampung.
4. Variabel modal fisik, modal manusia, dan TPAK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PDRB di kota/kabupaten Provinsi Lampung pada tahun 2017–2022. Hasil ini menunjukkan bahwa jika terjadi perubahan pada modal fisik, modal manusia, dan TPAK secara simultan, maka akan memengaruhi PDRB di kota/kabupaten Provinsi Lampung.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan ini, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

a) Peningkatan Modal Fisik

- Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan upaya penggalian potensi investasi modal fisik yang memiliki keunggulan dan sesuai dengan potensi ekonomi Provinsi Lampung.
- Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pembentukan modal melalui pengalokasian anggaran untuk pengadaan investasi modal fisik.
- Pemerintah daerah diharapkan dapat memelihara pertumbuhan investasi modal fisik dengan terus memperbaiki kualitas pelayanan dan perizinan, baik dari segi sarana maupun kemampuan petugas layanan. Pemerintah daerah dapat mengadakan bimbingan teknis bagi petugas layanan, serta pengadaan fasilitas yang memadai termasuk internet berkecepatan tinggi, stabil, dan merata di seluruh daerah untuk menunjang kinerja pelayanan.

b) Peningkatan Modal Manusia

- Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong efisiensi alokasi anggaran pada bidang-bidang penyusun IPM serta memastikan distribusinya proporsional dan sesuai kebutuhan.
- Pemerintah daerah diharapkan dapat mempermudah akses pendidikan dan kesehatan, serta memastikan penyebarannya merata dan terjangkau khususnya di tingkat Kabupaten mengingat IPM Kabupaten jauh lebih rendah dibandingkan IPM Kota di Provinsi Lampung.
- Pemerintah daerah diharapkan dapat membenahi aspek bidang pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan kualitas sarana prasarana, mutu pendidikan dan kesehatan, serta kompetensi tenaga pendidik dan kesehatan juga memastikan ketersediaannya merata dan memadai di setiap wilayah.

- Pemerintah daerah bersama aparaturnya dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan mempromosikan gerakan hidup sehat, sehingga kualitas modal manusia semakin baik.

c) Peningkatan TPAK

- Pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi pencari kerja melalui penyediaan lapangan pekerjaan serta pemberian informasi yang luas.
- Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha bagi ibu rumah tangga dan UMKM berbasis ekonomi kreatif.
- Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan yang berkualitas dan pelatihan kerja, sehingga mampu bersaing di pasar tenaga kerja.
- Pemerintah daerah diharapkan dapat memperhatikan relevansi penyelenggaraan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tenaga kerja memiliki daya saing di pasar tenaga kerja

2. Bagi Peneliti

- a) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan pengembangan penelitian ini baik melalui pengayaan variabel, analisis, maupun objek penelitian agar hasil penelitian lebih baik. Penelitian lanjutan yang lebih mendalam diperlukan untuk melengkapi hasil penelitian, mengingat adanya keterbatasan dalam penelitian ini.
- b) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbarui tahun penelitian agar lebih relevan dengan periode yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, N., Idris, & Marwan. (2018). The Labor Force Participation Rate, Export, and The Educational Investment Impact for The Economic Growth in Riau. *International Conference On Economics Education, Economics, Business and Management, Accounting and Entrepreneurship (PICEEBA 2018)*. 57, pp. 397-401. Indonesia: Atlantis Press.
- Afriliani, H. N., Marselina, U. M., Yuliawan, D., & Wahyudi, H. (2023). Ilmu Pengaruh Belanja Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung. *BULLET : Jurnal Multidisiplin*, 2(2), 360-367.
- Alam, H. V., Baruwadi, M. H., Mopangga, H., Tantawi, R., & Akib, F. H. (2021). Human Capital Quality Development Strategy in Efforts to Improve Economic Growth in Boalemo District, Gorontalo Province. *Elementary Education Online*, 20(5), 296-312.
- Alayda, F. D., Sodik, J., & Nuryadin, D. (2022). Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2020. *Sibatik Journal*, 1(6), 897-906.
- Alexander, Y., & Kaluge, D. (2019). Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan manusia (IPM), Investasi dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Timur Periode 2010-2017. *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya*, 1-15.
- Amir, H., Khan, M., & Bilal, K. (2015). Impact of Educated Labor Force on Economic Growth of Pakistan: A Human Capital Perspective. *European Online Journal of Natural and Social Sciences*, 4(4), 814-831.
- Anfasa, M. A. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Angkatan Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat Tahun 2013-2019. *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya*, 1-16.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto 2017-2019*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto 2020-2022*. Retrieved from < <https://www.bps.go.id/indicator/52/286/1/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-.html> > [Diakses pada 14 Agustus 2022]

- Bank Indonesia. (2018). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Lampung Februari 2018*. Bandar Lampung: KPW BI Provinsi Lampung.
- Bank Indonesia. (2019). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Lampung Februari 2019*. Bandar Lampung: KPW BI Provinsi Lampung.
- Bank Indonesia. (2020). *Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Februari 2020*. Bandar Lampung: KPW BI Provinsi Lampung.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Februari 2021*. Bandar Lampung: KPW BI Provinsi Lampung.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Februari 2022*. Bandar Lampung: KPW BI Provinsi Lampung.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Februari 2023*. Bandar Lampung: KPW BI Provinsi Lampung.
- Bappenas. (2014). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bappenas. (2019). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2015). Analisis Komposisi Pengeluaran Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mendukung Good Governance Dalam Memasuki MEA (Studi Empiris Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014). *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA)* (pp. 1-19). Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Bentour, E. M. (2020). The effects of human capital on economic growth in the Arab countries compared to some Asian and OECD countries. *Arab Monetary Fund Journal*, 1-35.
- BPS. (2019). *Indeks Pembangunan Manusia 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2021). *Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran 2016-2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- BPS. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi Di Indonesia Menurut Pengeluaran 2018-2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS Kabupaten Lampung Barat. (2023). *Statistik Daerah Kabupaten Lampung Barat 2023*. Lampung Barat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat.
- BPS Kabupaten Lampung Selatan. (2023). *Statistik Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2023*. Lampung Selatan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan.
- BPS Kabupaten Lampung Tengah. (2023). *Statistik Daerah Kabupaten Lampung Tengah 2023*. Lampung Tengah: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah.
- BPS Kabupaten Lampung Timur. (2023). *Statistik Daerah Kabupaten Lampung Timur 2023*. Lampung Timur: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur.
- BPS Kabupaten Pesisir Barat. (2023). *Statistik Daerah Kabupaten Pesisir Barat 2023*. Pesisir Barat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Barat.
- BPS Kota Metro. (2023). *Statistik Daerah Kota Metro 2023*. Metro : Badan Pusat Statistik Kota Metro.
- BPS Provinsi Lampung. (2018). *[SERI 2010] PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten_Kota 2017-2018*. Retrieved from < <https://www.bps.go.id/indicator/171/2194/3/-seri-2010-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-2010-100-menurut-pengeluaran-kabupaten-kota.html> > [Diakses pada 14 Agustus 2022]
- BPS Provinsi Lampung. (2019). *Indeks Pembangunan Manusia 2017-2019*. Retrieved from < <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/35/2/indeks-pembangunan-manusia.html> > [Diakses pada 14 Agustus 2022]
- BPS Provinsi Lampung. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kabupaten_Kota 2017-2019*. Retrieved from < <https://lampung.bps.go.id/indicator/52/621/2/produk-domestik-regional-bruto-menurut-kabupaten-kota.html> > [Diakses pada 14 Agustus 2022]
- BPS Provinsi Lampung. (2019). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2017-2019*. Retrieved from < <https://lampung.bps.go.id/indicator/6/445/2/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-tpak-.html> > [Diakses pada 14 Agustus 2022]
- BPS Provinsi Lampung. (2020). *[SERI 2010] PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten_Kota 2019-2020*. Retrieved from < <https://www.bps.go.id/indicator/171/2194/2/-seri-2010-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-2010-100-menurut-pengeluaran-kabupaten-kota.html> > [Diakses pada 14 Agustus 2022]

- BPS Provinsi Lampung. (2020). *Laporan Perekonomian Provinsi Lampung 2019*. Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- BPS Provinsi Lampung. (2022). *[SERI 2010] PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten_Kota 2021-2022*. Retrieved from < <https://www.bps.go.id/indicator/171/2194/1/-seri-2010-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-2010-100-menurut-pengeluaran-kabupaten-kota.html> > [Diakses pada 14 Agustus 2022]
- BPS Provinsi Lampung. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia 2020-2022*. Retrieved from < <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/35/1/indeks-pembangunan-manusia.html> > [Diakses pada 14 Agustus 2022]
- BPS Provinsi Lampung. (2022). *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kabupaten_Kota 2020-2022*. Retrieved from < <https://lampung.bps.go.id/indicator/52/621/1/produk-domestik-regional-bruto-menurut-kabupaten-kota.html> > [Diakses pada 14 Agustus 2022]
- BPS Provinsi Lampung. (2022). *Provinsi Lampung Dalam Angka 2022*. Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- BPS Provinsi Lampung. (2022). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2020-2022*. Retrieved from < <https://lampung.bps.go.id/indicator/6/445/1/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-tpak-.html> > [Diakses pada 14 Agustus 2022]
- BPS Provinsi Lampung. (2023). *Laporan Perekonomian Provinsi Lampung 2022*. Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- BPS Provinsi Lampung. (2023). *Statistik Daerah Provinsi Lampung 2023*. Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- BPS Provinsi Lampung. (2024). *Metodologi PDRB Pengeluaran*. Retrieved from <<https://lampung.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html>> [Diakses pada 18 Maret 2024]
- Brilyawan, K., & Santosa, P. B. (2021). Pengaruh Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015 – 2019. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(1), 1-10.
- Budiarti, I. (2019). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Bandarlampung: Pustaka Media.
- Budidharma, I. (2015). Pengaruh Modal Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta. *BAPPEDA Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*, 1-7.
- Budiman, M. A., Rohima, S., & Yulianita, A. (2021). Human Capital, Labour Force, And Economic Growth: Case Study of Across Regions in Indonesia. *Jurnal Modern Economics*, 28(3), 22-27.

- Case, K. E., & Fair, R. C. (2007). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Edisi Kedelapan Jilid 2*. (Y. A. Zaimur, Trans.) Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dhiya, A., Kathya, & Mingshen. (2021). Endogenous Growth Theory: Pengaruh Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Ekonomi. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 3(1), 1-19.
- DJPb Provinsi Lampung. (2018). *Kajian Fiskal Regional Provinsi Lampung Tahun 2017*. Lampung: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung.
- DJPb Provinsi Lampung. (2019). *Kajian Fiskal Regional Provinsi Lampung Tahun 2018*. Lampung: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung.
- DJPb Provinsi Lampung. (2020). *Kajian Fiskal Regional Provinsi Lampung Tahun 2019*. Lampung: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung.
- DJPb Provinsi Lampung. (2021). *Kajian Fiskal Regional Provinsi Lampung Tahun 2020*. Lampung: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung.
- DJPb Provinsi Lampung. (2022). *Kajian Fiskal Regional Provinsi Lampung Tahun 2021*. Lampung: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung.
- DJPb Provinsi Lampung. (2023). *Kajian Fiskal Regional Provinsi Lampung Tahun 2022*. Lampung : Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung.
- DPMPTSP Provinsi Lampung. (2023). *Laporan Kinerja 2022*. Bandar Lampung: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampung.
- Erza, O., & Febrianti, P. A. (2022). Pengaruh Belanja Pemerintah, Produktivitas Tenaga Kerja, Ipm, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Universitas Trisakti*, 1-12.
- Fathy, A., & Safijllin, L. N. (2019). Causal Relationship Between Human Capital And Economic Growth In European Countries (EU-28): Panel Analysis. *International Journal On Emerging Technologies*, 20(2a), 66-70.
- Fikri, F. (2017). Pengaruh Human Capital (Modal Manusia) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya*, 1-11.
- Gruzina, Y., Firsova, I., & Strielkowski, W. (2021). Dynamics of Human Capital Development in Economic Development Cycles. *Economies*, 9(67), 1-18.

- Haerani, M., & Rahman, A. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bulukumba. *Journal of Regional Economics*, 2(2), 1-13.
- Hafeez, A. (2019). Human Capital and Economic Growth: Evidences from Pakistan. *Journal of Research in Social Sciences*, 7(1), 1-8.
- Haidar, M. I., & Firmansyah. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara ASEAN. *Jurnal Forum Ekonomi*, 23(3), 593-605.
- Hakiki, A., Yulmardi, & Zulfanetti. (2020). Estimasi Model Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. *Jurnal Akrab Juara*, 5(3), 32-45.
- Hanifah, & Yulhendri. (2022). Human Capital, Kebijakan Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Salingka Nagari*, 1(1), 78-92.
- Hartati, Y. S. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(1), 79-92.
- Hasyiyati, Z., & Sahara, S. (2020). The Composition of Human Capital and Economic Growth: Evidence from Aceh and West Papua Provinces, Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(2), 132-142.
- Hendarmin. (2019). Menelusuri Kembali Peran Investasi Modal Manusia dan Modal Fisik Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Produktivitas. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 8(3), 216-235.
- Hendarmin, & Kartika, M. (2019). The Relationship Between Human Capital and the Regional Economy Productivity. *Journal of Economics and Policy*, 12(1), 138-152.
- Hierdawati, T. (2022). Pengaruh TPAK, Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Humantech Jurnal Ilmiah Multidisplin Indonesia*, 1(8), 958-966.
- Hutami, R. Y., & Riani, N. Z. (2022). Peran Investasi Modal Manusia dan Modal Fisik dalam Meningkatkan Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia. *Ecosains Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 11(1), 30-40.
- Istianto, T., Kumenaung, A. G., & Lopian, A. L. (2021). Analisis Pengaruh Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Bolaang Mongondow Raya. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3), 75-95.
- Jojo, Gandhy, A., Simanullang, E. S., & Frasipa, A. (2019). Analisis Human Capital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *JIM UPB*, 7(2), 170-180.

- Kazmi, S. M., Ali, K., & Ali, G. (2017). Impact of Human capital on Economic Growth: Evidence from Pakistan. *Sustainable Development Policy Institute, 1*(162), 1-12.
- Keji, S. A. (2021). Human capital and economic growth in Nigeria. *Future Business Journal, 7*(1), 1-8.
- Lestari, D. N., Indrawati, L. R., & Jalunggono, G. (2021). Analisis Pengaruh Inflasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Directory Journal of Economic, 3*(1), 236-246.
- Maimunah, E., & Emalia, Z. (2015). Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi di Indonesia : Sebuah Analisis Data Panel. *Prosiding Forum Riset Ekonomi dan Bisnis, 1*-8.
- Manginsihi, J. G., Naukoko, A. T., & Tumangkeng, S. Y. (2022). Analisis Pengaruh Modal Manusia dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Produktivitas Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 22*(4), 1-14.
- Mangkoesebroto, G. (1995). *Ekonomi Publik Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2014). *Pengantar Ekonomi Makro : Principles of Economics an Asian Edition - Volume 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A Contribution to The Empirics of Economic Growth. *The Quarterly Journal Of Economics, 407*-437.
- Manurung, W., Fajar, M., & Noviar. (2022). Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 6*(2), 36-44.
- Mirah, M. R., Kindangen, P., & Rorong, I. P. (2020). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 21*(1), 85-100.
- Mukarramah, Yolanda, C., & Zulkarnain, M. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Modal dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika, 3*(2), 105-117.
- Mulyasari, A. (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Angkatan Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto. *Economics Development Analysis Journal, 5*(4), 368-376.
- Nurwanda, A., & Rifai, B. (2018). Diagnosis Pertumbuhan Ekonomi dan Output Potensial Indonesia. *Kajian Ekonomi Keuangan, 2*(3), 177-194.

- Nurwijayati, N. (2017). Pengaruh Indikator Komposit Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi DIY. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 6(6), 520-529.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.*
- Prameswari, A., Muljaningsih, S., & Asmara, K. (2021). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 168-179.
- Pratiwi, R. S. (2021). Analisis Pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya*, 1(1), 1-14.
- Rahmawati, Y. O. (2019). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Pengerluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 1995-2017. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya*, 1-12.
- Rani, M. P., Syapsan, & Tampubolon, D. (2021). Peran Investasi Modal Fisik dan Modal Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 18(2), 195-202.
- Ririhena, S. W., & Maro, R. T. (2018). Effects of Investment (PMTB) on Economic Growth and Employment In Papua Province. *International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)*. 226, pp. 1-4. Merauke: Atlantic Press.
- Rostiana, E., & Rodesbi, A. (2020). Demographic Transition and Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Economia*, 16(1), 1-17.
- Sirait, R. A. (2016). Kesenjangan Human Capital Antar Wilayah: Agenda yang Belum Selesai. *Buletin APBN*. 1 (5), pp. 2-5. Jakarta: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.
- Sjafii, A. (2009). Pengaruh Investasi Fisik dan Investasi Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 1990-2004. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 3(1), 59-76.
- Sufriyandi, Dianta, K., & Suparno. (2022). The Effect of Provincial Minimum Wage, Investment, and Labor Force Participation Rate on Economic Growth in Central Java. *International Journal Of Current Economics & Business Ventures*, 2(1), 1-10.

- Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(1), 29-50.
- Supartoyo, Y. H., Tatum, J., & Sendouw, R. H. (2013). The Economic Growth and The Regional Characteristics: The Case of Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 3-19.
- Susetyo, D., Zunaidah, Yulianita, A., & Lestari, W. (2018). Effect of Capital Expenditure, Investments and Human Development Index to Gross Regional Domestic Product Provinces in Sumatra-Indonesia. *Proceedings of the 4th Sriwijaya Economics, Accounting, and Business Conference (SEABC 2018)* (pp. 402-412). Palembang: Science and Technology Publications.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1*. (A. Dharma, Trans.) Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (5)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*.
- Wahyudi. (2020). Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, (pp. 103-113). Pontianak.
- Wahyudi, H., & Silpayana. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera (Analysis of Economic Growth Sumatera). *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 1(2), 111-124.
- Wahyunadi. (2019). Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Di Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2010 – 2015. *Elastisitas Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 79-90.
- Wasiaturrahma, & Chairunissa, N. (2022). Endogenous Growth Factors in Four Categories Of Countries Based on HDI. *Journal Unrika Dimensi*, 11(3), 567-583.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya disertai Panduan Eviews Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widarni, E. L., & Bawono, S. (2021). Human Capital, Technology, and Economic Growth: A Case Study of Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(5), 29-35.
- Yusuf, M. Z., Hidayati, N., Wibowo, M. G., & Khusniati, N. (2022). Pengaruh Pendidikan dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 19(1), 25-38.